

### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Dalam BAB ini akan dipaparkan mengenai hasil penelitian tentang persepsi masyarakat terhadap kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul pada masa Sri Surya Widati tahun 2010 - 2015. Penelitian dilakukan dengan membagikan kuesioner kepada masyarakat di Kecamatan Kretek yang terdiri atas 5 kelurahan yaitu Desa Donotirto 27 responden, Desa Parangtritis 25 responden, Desa Tirtomulyo 23 responden, Desa Tirtosari 15 responden, dan Desa Tirtoharjo 10 responden. Warga yang terpilih menjadi responden dianggap mewakili dari suara populasi yang ada. Alasan tersebutlah mengapa penulis menjadikan masyarakat di 5 Kelurahan tersebut sebagai unit analisa. Untuk lebih jelasnya deskripsi responden dalam penelitian ini dapat dilihat pada penjelasan di bawah ini.

#### **A. Deskripsi Responden**

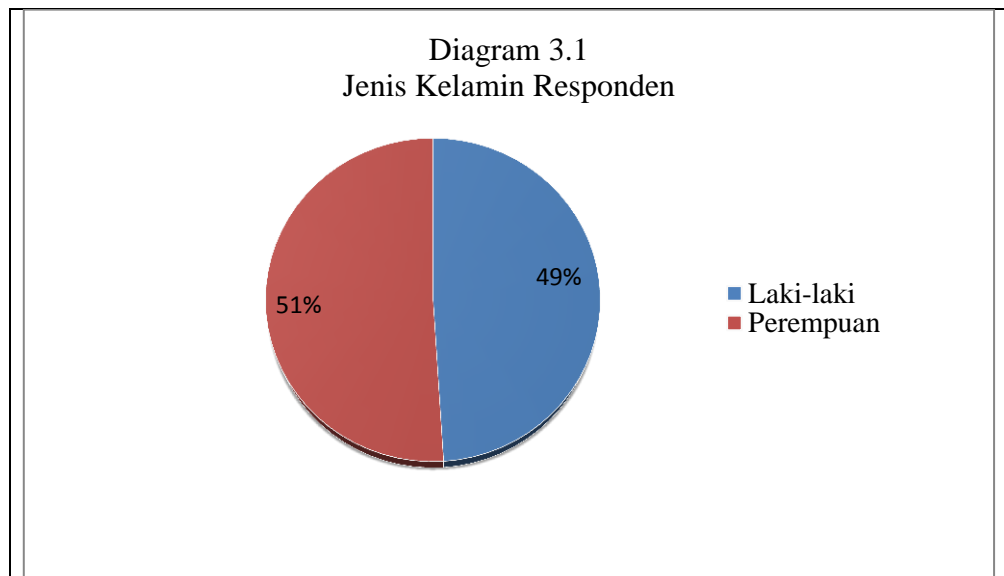
##### **1. Deskripsi Responden Menurut Jenis Kelamin**

Sesuai dengan perhitungan yang telah dilakukan terhadap data yang telah terkumpul yaitu dari 100 orang responden berdasarkan komposisi jenis kelaminnya adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1  
Deskripsi Responden Menurut Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Frekuensi	Presentase
1	Laki-laki	49	49%
2	Perempuan	51	51%
	Jumlah	100	100%

Sumber: Data Primer 2016



Berdasarkan tabel dan diagram di atas, maka dapat kita lihat bahwa jumlah responden perempuan lebih banyak daripada jumlah responden laki-laki, yaitu sebanyak 51 responden dengan presentase (51%) berjenis kelamin perempuan dan 49 responden dengan presentase (49%) berjenis kelamin laki-laki. Perbedaan jumlah responden berdasarkan jenis kelaminnya tidak terlalu signifikan karena hanya berselisih 2%.

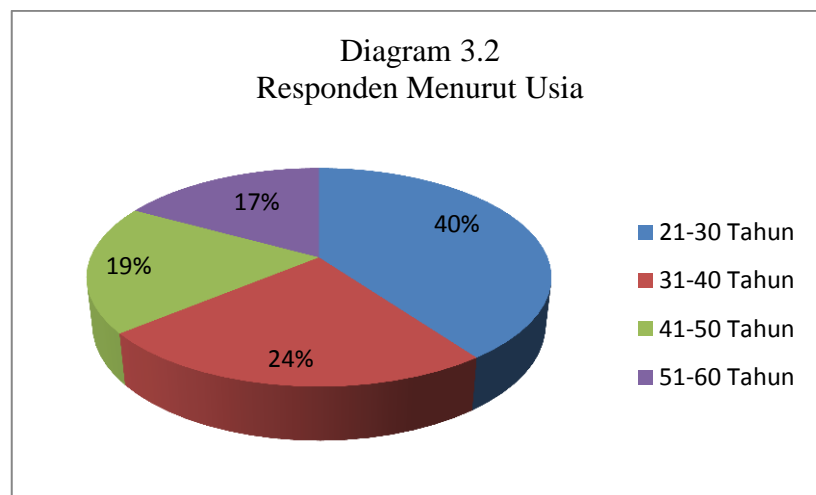
## 2. Deskripsi Responden Menurut Usia

Sesuai dengan perhitungan yang telah dilakukan oleh penulis terhadap data yang telah terkumpul yaitu dari 100 orang responden berdasarkan komposisi usianya terbagi dalam beberapa kelompok seperti pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.2  
Deskripsi Responden Menurut Usia

No	Usia	Frekuensi	Presentase (%)
1	21-30	40	40%
2	31-40	24	24%
3	41-50	19	19%
4	51-60	17	17%
	Jumlah	100	100%

Sumber: Data Primer 2016



Dilihat dari tabel dan diagram di atas jumlah responden berdasarkan klasifikasi umur yaitu, responden berumur antara 21 tahun sampai 30 tahun berjumlah 40 orang dengan presentase 40%, kemudian umur 31 tahun

hingga 40 tahun berjumlah 24 orang dengan presentase 24%, sedangkan umur 41 sampai 50 tahun sebanyak 19 orang dengan presentase 19%, dan umur 51 hingga 60 tahun berjumlah 17 orang dengan presentase 17%. Jadi dapat disimpulkan bahwa responden terbanyak adalah berumur antara 21 tahun sampai 30 tahun dengan jumlah 40 orang dengan presentase 40%.

### 3. Deskripsi Responden Menurut Pekerjaan

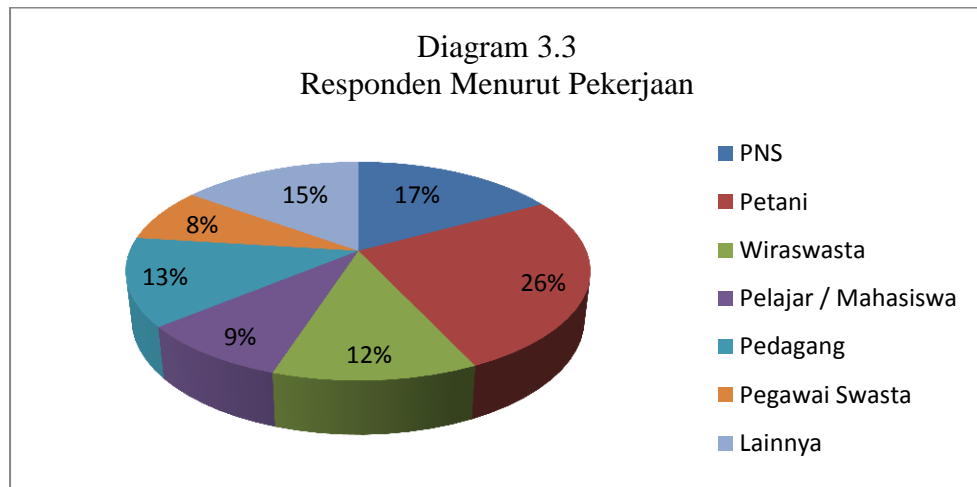
Berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan maka dari 100 responden dapat dibedakan komposisi menurut jenis pekerjaannya dan terbagi dalam beberapa kategori seperti dalam tabel dan diagram berikut ini:

Tabel 3.3

Deskripsi Responden Menurut Pekerjaan

No	Pekerjaan Utama	Frekuensi	Presentase (%)
1	PNS	17	17%
2	Petani	26	26%
3	Wiraswasta	12	12%
4	Pelajar / Mahasiswa	9	9%
5	Pedagang	13	13%
6	Pegawai Swasta	8	8%
7	Lainnya	15	15%
	Jumlah	100	100%

Sumber: Data Primer 2016



Dilihat dari tabel dan diagram di atas jumlah responden berdasarkan klasifikasi pekerjaannya yaitu, responden Pegawai Negeri Sipil (PNS) berjumlah 17 orang dengan presentase 17%, Petani berjumlah 26 orang dengan presentase 26%, kemudian 12 orang dengan presentase 12% untuk Wiraswasta, sedangkan untuk Pelajar / Mahasiswa berjumlah 9 orang dengan presentase 9%, Pedagang berjumlah 13 orang dengan presentase 13%, untuk Pegawai Swasta berjumlah 8 orang (8%), dan pekerjaan lainnya berjumlah 15 orang dengan presentase 15%. Jumlah responden terbanyak adalah dengan pekerjaan sebagai petani yaitu sebanyak 26 orang dengan presentase 26%.

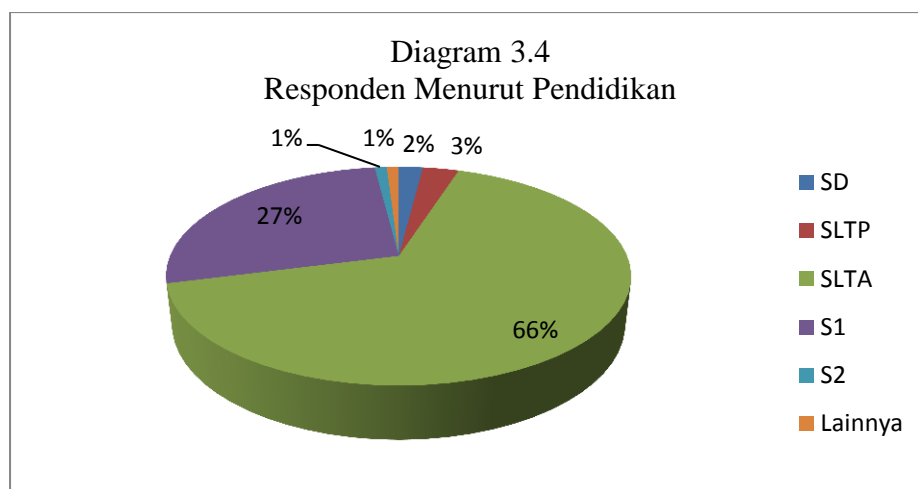
#### 4. Deskripsi Responden Menurut Pendidikan

Sesuai dengan perhitungan yang telah dilakukan oleh penulis maka dari 100 responden dapat dibedakan menurut pendidikannya sebagai berikut:

Tabel 3.4  
Deskripsi Responden Menurut Pendidikan

No	Pendidikan	Frekuensi	Presentase (%)
1	SD	2	2%
2	SLTP	3	3%
3	SLTA	66	66%
4	S1	27	27%
5	S2	1	1%
6	Lainnya	1	1%
	Jumlah	100	100%

Sumber: Data Primer 2016



Berdasarkan data di atas, dapat dilihat bahwa responden dengan pendidikan Sekolah Dasar (SD) berjumlah 2 orang dengan presentase 2%, responden dengan pendidikan SLTP berjumlah 3 orang (3%), sedangkan responden dengan pendidikan SLTA sebanyak 66 orang dengan presentase 66%, kemudian pendidikan S1 berjumlah 27 orang dengan presentase 27%,

untuk pendidikan S2 berjumlah 1 orang (1%), dan pendidikan lainnya berjumlah 1 orang dengan presentase 1%. Dengan demikian maka, responden terbanyak adalah berpendidikan SLTA yaitu dengan jumlah 66 orang dengan presentase 66%.

**B. Persepsi Masyarakat Terhadap Kinerja Pemerintah Kabupaten Bantul Pada Masa Sri Surya Widati Tahun 2010-2015**

**1. Produktifitas**

Penilaian masyarakat terkait aspek produktifitas adalah sebagai berikut:

Tabel 3.5

Penilaian Responden terhadap peningkatan efektifitas birokrasi Pemerintah Kabupaten Bantul Pada Masa Sri Surya Widati Tahun 2010-2015

No	Jawaban	Frekuensi	Presentase
1	Sangat Setuju	1	1%
2	Setuju	72	72%
3	Tidak Setuju	24	24%
4	Sangat Tidak Setuju	3	3%
	Jumlah	100	100%

Sumber: Hasil Kuesioner 1

Berdasarkan tabel 3.5 dapat dilihat bahwa penilaian responden terhadap peningkatan efektifitas birokrasi pada masa Bupati Bantul tahun 2010-2015 adalah 1 responden dengan presentase 1% menjawab sangat setuju, 72 responden dengan presentase 72% menjawab setuju, kemudian 24 responden dengan presentase 24% menjawab tidak setuju, dan 3 responden dengan presentase 3% menjawab sangat tidak setuju.

Nilai indeks terkait peningkatan efektifitas birokrasi pada masa Bupati Bantul tahun 2010-2015 adalah 2,71 dengan kategori baik. Data dari hasil kuesioner tersebut didukung oleh hasil dari wawancara dengan 8 orang, 5 orang menjawab setuju sedangkan 3 orang menjawab tidak setuju. Berikut hasil wawancaranya:

Ibu Tatik (32 tahun, ibu rumah tangga) mengatakan:

“Menurut saya efektif mbak, pelayanannya cepat tidak menunggu lama, kalau mengurus apapun ke kantor kecamatan maupun kantor desa lancar dan cepat”.

Bapak Ramadi (40 tahun, pedagang) mengatakan:

“Untuk tingkat kabupaten saya kurang tau mbak, karena tidak pernah mengurus apapun kesana. Tetapi kalau pelayanan di kecamatan dan desa yang diberikan sekarang efektif, cepat dan lancar semuanya. Tidak menyulitkan masyarakat”.

Bapak Sunarto (52 tahun, buruh tani):

“Selama ini kalau saya mengurus apa-apa ke kantor kecamatan dan desa cepat pelayanannya dan sudah bagus juga. Ya intinya saya merasa puas dengan pelayanan yang diberikan, karena tidak “bertele-tele” dan tidak menyusahkan”.

Ibu Maya (29 tahun, Guru) mengatakan:

“Saya kalau mengurus apa-apa ke kantor kecamatan atau kantor desa cepet kok mbak. Buat E-KTP juga bisa langsung jadi. Nggak menunggu sampai berhari-hari”.

Bapak Rian (30 tahun, petani):

“Sudah bagus pelayanannya mbak. saya baru kemarin perpanjang E-KTP langsung jadi, tetapi karena saya telat perpanjangnya jadi kena denda”.



Sedangkan untuk yang tidak setuju jika efektif hasil wawancaranya sebagai berikut:

Ibu Rosida (42 tahun, petani) berpendapat:

“Kurang efektif mbak karena kantor terkadang tutup cepat. Jika seharusnya tutup sore tetapi siang sudah tidak ada orang. Mengingat petani kalau pagi bekerja, jadi kalau mau mengurus apa-apa bisanya siang hingga sore, tetapi setelah jam istirahat sudah sepi”.

Hal lain yang sama disampaikan oleh Ibu Mujiati (56 tahun, ibu rumah tangga):

“Saya dulu pernah datang ke kantor pagi, sekitar jam 08:00 WIB, tetapi sampai di kantor tidak ada orang karena semuanya pergi senam. Sebenarnya mereka digaji untuk senam atau melayani masyarakat. Padahal itu masih jam kerja dan hari kerja juga”.

Selain itu juga ibu Sri (37 tahun, pedagang) berpendapat bahwa:

“Saya pernah mengurus Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di kantor perizinan dan sangat dipersulit tidak efektif sama sekali, tetapi ketika tidak saya urus ada pihak yang datang kemudian meminta bangunan yang saya gunakan untuk berjualan minta untuk dihancurkan. Apa dikiranya ini hanya habis Rp 100.000; untuk membangunnya, lantas diminta hancurkan. Kalau mau ada izin seharusnya jangan dipersulit perizinannya. Mereka tidak memikirkan masyarakat biasa seperti saya ini”.

Tanggapan yang diberikan oleh masyarakat ada yang sama dan ada yang berbeda. Ketika mendapatkan pelayanan yang baik maka akan menjawab baik dan setuju jika efektif. Namun ketika mendapatkan pelayanan yang buruk maka akan menjawab tidak setuju jika efektif. Perbedaan persepsi ini berdasarkan faktor yang mempengaruhinya, yaitu faktor pengalaman. Kesalahan pada birokrat adalah dalam hal manajemen waktu sangat tidak teratur. Ketika waktunya memberikan pelayanan kepada masyarakat, jangan kemudian melakukan kegiatan lain yang tidak masuk dalam *job desk*.

Olahraga atau senam itu memang baik dan bagus untuk kesehatan. Jika birokrat tidak sehat maka tidak akan dapat melayani masyarakat. Tetapi kesalahannya di sini adalah tidak lantas kemudian jam kerja yang digunakan untuk memberi pelayanan kepada masyarakat digunakan untuk senam dan sebagainya. Seharusnya mereka menggunakan hari liburnya untuk berolahraga, karena sudah ada hari libur tersendiri. Sehingga tidak mengganggu jam kerja dan pelayanan.

Tidak hanya itu, jam kantor yang tutup dengan cepat juga dikeluhkan oleh masyarakat. Jika seharusnya jam 16.00 WIB kantor baru tutup tetapi jam 14.00 WIB bahkan jam 13.00 WIB sudah tidak menerima pelayanan karena pegawai meninggalkan kantor. Alasan yang mereka katakan adalah mereka menggunakan jam istirahat untuk melayani kemudian jam kerjanya selesai dengan cepat. Ini pun juga peneliti alami ketika memberikan surat penelitian. Ketika sampai di kantor desa jam 12.45 WIB sudah tidak ada pegawai, yang ada hanya penjaga kantor saja. Seharusnya itu masih jam kerja tetapi tutup begitu cepat.

Hal-hal seperti ini sangat melanggar prosedur, karena tidak semua masyarakat dapat mengurus keperluannya pada pagi hari karena harus bekerja. Selain itu juga, mereka sebagai pegawai diberikan bayaran setiap bulannya untuk memberikan pelayanan yang baik bagi masyarakat bukan bekerja atas kehendaknya sendiri.

Pelayanan yang efektif adalah jika seorang birokrat mampu memberikan pelayanan kepada publik dengan baik dan dapat memenuhi

target dari tugas yang telah ditentukan sebelumnya. Selain itu juga efektif dilihat dari segi hasil dan juga usaha yang diukur dengan mutu, jumlah serta ketepatan waktu sesuai dengan prosedur dan ukuran tertentu yang telah dibuat.

Tabel 3.6

Penilaian Responden terhadap peningkatan efisiensi birokrasi Pemerintah Kabupaten Bantul Pada Masa Sri Surya Widati Tahun 2010-2015

No	Jawaban	Frekuensi	Presentase
1	Sangat Setuju	1	1%
2	Setuju	75	75%
3	Tidak Setuju	24	24%
4	Sangat Tidak Setuju	-	-
	Jumlah	100	100%

Sumber: Hasil Kuesioner 2

Berdasarkan tabel 3.6 di atas penilaian responden terhadap peningkatan efisiensi birokrasi pada masa Bupati Bantul tahun 2010-2015 adalah 1 responden dengan presentase 1% menjawab sangat setuju, kemudian 75 responden dengan presentase 75% menjawab setuju, dan 24 responden dengan presentase 24% menjawab tidak setuju.

Nilai indeks terkait efisiensi birokrasi pada masa Bupati Bantul tahun 2010-2015 adalah 2,77 dengan kategori baik. Data dari hasil kuesioner tersebut didukung oleh hasil dari wawancara dengan 8 orang, 5 orang menjawab setuju sedangkan 3 orang menjawab tidak setuju. Berikut hasil wawancaranya:

Bapak Ramadi (40 tahun, pedagang) mengatakan:

“Menurut saya efisien, karena kalau melakukan pelayanan dengan cepat akan menghemat waktu yang digunakan jadi tidak membuang-buang waktu untuk mengurus 1 (satu) hal saja”

Ibu Maya (29 tahun, Guru) mengatakan:

“Cukup efisien karena kalau pelayanan bisa dengan cepat saya tidak perlu bolak-balik ke kantor untuk mengurusnya, selain hemat waktu juga hemat biaya, karena dari rumah kalau ke kantor Kecamatan lumayan jauh juga”.

Bapak Sunarto (52 tahun, buruh tani) mengatakan:

“Menurut saya efisien, karena pelayanan yang cepat serta tidak membuang banyak waktu”

Bapak Rian (30 tahun, petani) mengatakan:

“Jika dalam hal pelayanannya efektif sudah tentu efisien juga. Jadi saya perpanjang e-ktip tidak menghabiskan banyak waktu dan tenaga juga. Untuk masalah denda karena telat perpanjang itu tidak masalah karena biar masyarakat jadi disiplin juga, kalau tidak mau kena denda ya perpanjang tepat waktu. Jadi pegawainya juga leluasa melayaninya kalau tidak ada antrian”.

Ibu Tatik (32 tahun, ibu rumah tangga) mengatakan:

“Menurut saya efisien mbak, karena tidak membuang waktu, tenaga dan tidak mengeluarkan biaya yang lebih. Coba kalau tidak langsung jadi pasti saya harus kembali lagi dan itu menambah biaya lagi untuk transportasi”.

Sedangkan untuk yang tidak setuju jika efisien hasil wawancaranya sebagai berikut:

Ibu Mujiati (56 tahun, ibu rumah tangga) berpendapat:

“Tidak efisien mbak karena membuang-buang waktu dan tenaga saya, selain itu juga mengeluarkan biaya yang lebih”

Hal yang sama disampaikan oleh Ibu Rosida (42 tahun, petani):

“Menurut saya tidak efisien, karena saya harus bolak-balik ke kantor. Seharusnya sehari bisa jadi tetapi ini tidak. Belum lagi saya meninggalkan pekerjaan saya agar bisa mengurus pagi hari, karena biasanya siang sudah tutup tetapi pagi pun juga begitu”.

Selain itu juga ibu Sri (37 tahun, pedagang) berpendapat bahwa:

“Karena dalam mengurus perizinannya dipersulit tentunya saya harus sering pergi ke kantornya. Itu sangat membuang waktu dan tenaga. Tidak hanya itu biaya transportasi juga keluar lebih karena jarak kantornya yang jauh”.

Berdasarkan persepsi masyarakat terkait efisiensi, pada umumnya persepsi mereka dipengaruhi oleh faktor pengalamannya. Efisiensi menunjukkan bagaimana cara mencapai atau mendapatkannya, dilihat dari segi usaha, biaya, tenaga dan waktu yang dikeluarkan. Adanya efisiensi diharapkan para birokrat dalam menjalankan tugas-tugas pelayanan kepada masyarakat tidak boros. Artinya bahwa para birokrat secara berhati-hati agar memberikan hasil yang sebesar-besarnya kepada publik. Dengan demikian nilai efisiensi lebih mengarah kepada penggunaan sumber daya yang dimiliki secara tepat, tidak boros serta dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Penerapan dari prinsip efisiensi digunakan untuk menyelesaikan tugas dan pekerjaan birokrat secara cepat dan tetap dalam waktu singkat, ringkas dan tidak berbelit-belit (tidak melalui banyak meja), berprestasi tinggi dan tidak mengalami pemborosan atau keborosan waktu maupun dana dan tenaga serta mampu menghasilkan pelayanan yang berkualitas.

Efisiensi tidak hanya berkaitan dengan masyarakat yang memiliki kepentingan namun juga berkaitan dengan birokrat yang melakukan pelayanan. Jika pelayanan yang diberikan oleh birokrat itu lama dan lamban maka akan menghabiskan banyak biaya dan tenaga, karena mengurus satu hal saja sedangkan pekerjaan yang lain akan terabaikan.

Apabila itu terjadi maka kerugian akan waktu, tenaga, dan biaya tidak hanya dialami oleh masyarakat yang meminta pelayanan, namun juga terhambatnya birokrat dalam menyelesaikan tugas-tugasnya yang telah dibuat diawal. Sehingga perlunya pengaturan waktu agar mampu menjalankan tugasnya secara efisien. Jika demikian maka masyarakat akan puas dengan pelayanan yang diberikan tersebut.

Tabel 3.7

Penilaian Responden terkait dedikasi (pengorbanan tenaga, pikiran, dan waktu) Bupati Bantul 2010-2015 yang baik

No	Jawaban	Frekuensi	Presentase
1	Sangat Setuju	7	7%
2	Setuju	60	60%
3	Tidak Setuju	33	33%
4	Sangat Tidak Setuju	-	-
	Jumlah	100	100%

Sumber: Hasil Kuesioner 3

Berdasarkan tabel 3.7 dapat dilihat bahwa penilaian responden terkait dedikasi (pengorbanan tenaga, pikiran, dan waktu) Bupati Bantul 2010 - 2015 yang baik adalah 7 responden dengan presentase 7% menjawab sangat setuju, kemudian 60 responden dengan presentase 60% menjawab setuju, dan 33 responden dengan presentase 33% menjawab tidak setuju.

Setelah melakukan perhitungan nilai indeks terkait dedikasi yang dimiliki oleh Bupati Bantul adalah 2,74 dengan kategori baik. Selain itu hasil dari kuesioner didukung oleh hasil wawancara dengan 10 orang, 5 orang menjawab setuju dan 5 orang yang lainnya menjawab tidak setuju.

Berikut hasil wawancaranya:

Ibu Maya (29 tahun, Guru) mengatakan:

“Bupati memiliki dedikasi yang baik walaupun tidak dapat datang langsung ke masyarakat. Tetapi yang terpenting kualitas pendidikan meningkat karena bertambahnya angka melek huruf, kualitas kesehatan juga baik, sektor pariwisata juga berjalan”.

Bapak Sunarto (52 tahun, buruh tani), beliau mengatakan bahwa:

“Setiap Kepala Daerah pasti memiliki dedikasi yang berguna untuk memajukan daerahnya. Walaupun terkadang tidak dapat maksimal dalam pengerjaannya. Tetapi mereka pasti sudah berusaha dan melakukan yang terbaik”.

Bapak Ramadi (40 tahun, pedagang):

“Masalah dedikasi Bupati menurut saya lumayan, dikarenakan hasil dari dedikasinya itu kelihatan. Seperti pembangunan jalan dan pasar, karena proyek yang sedang dijalankan selama 5 tahun itu membangun pasar di setiap kecamatan. Bagaimanapun pasar penting untuk perekonomian masyarakat”.

Ibu Tatik (32 tahun, ibu rumah tangga) mengatakan:

“Menurut saya dedikasi ibu Idha cukup baik, hal ini karena memperhatikan masyarakat yang kurang mampu dengan memberikan bantuan raskin, adanya kartu jaminan kesehatan juga. Beliau berfikir bagaimana cara membantu masyarakat yang kurang mampu, walaupun tidak turun langsung ke masyarakat”.

Ibu Sri (37 tahun, pedagang) mengatakan:

“Ibu Idha memiliki dedikasi yang baik, hal ini terbukti dengan kualitas dari pelayanan kesehatan meningkat. Adanya pelayanan vaksinasi

bagi balita dan anak sekolah. Beliau sangat memikirkan bagaimana agar anak-anak sebagai generasi penerus agar tetap sehat”,

Sedangkan untuk yang tidak setuju jika Bupati memiliki dedikasi yang baik, hasil wawancaranya sebagai berikut:

Ibu Ratna (42 tahun, PNS) mengatakan:

“Kalau menurut saya dedikasinya kurang mbak. karena tidak pernah meninjau langsung pembangunan yang ada di kecamatan. Seharusnya diadakan peninjauan sehingga beliau tau kemajuan dari pembangunannya tersebut”.

Bapak Tri (57 tahun, PNS) mengatakan:

“Dedikasinya kurang, karena tidak ada interaksi dengan masyarakat. Baiknya itu sesekali mengunjungi masyarakat dan mendengarkan keluhan, saran hingga kritik sehingga mampu memperbaiki kinerjanya”.

Ibu Rosida (42 tahun, petani) mengatakan:

“Menurut saya kurang dedikasinya, karena seperti peresmian jembatan di Tirtohargo yang datang wakilnya saja beliau tidak ikut hadir. Seharusnya agar masyarakat bisa senang itu Bupati ikut datang, jadi bisa melihat sendiri bagaimana keadaan di bawah”.

Ibu Mujati (56 tahun, ibu rumah tangga) mengatakan:

“Kalau terkait kerja di kantornya saya tidak tau mbak, tapi yang saya tau Ibu Idha tidak pernah turun langsung ke masyarakat. Cuma dulu waktu kampanye, setelah itu tidak pernah sama sekali. Jadi tidak pernah ada interaksi dengan masyarakat”.

Bapak Rian (30 tahun, petani) mengatakan:

“Dedikasi dari Bupati masa itu menurut saya masih kurang, karena dedikasi tidak hanya berkaitan dengan kerjanya di kantor namun juga datang ke masyarakat. Tetapi menurut saya siapapun pemimpinnya



akan sama saja seperti itu, sangat jarang yang dapat melakukan pengecekan sendiri ke masyarakat”.

Berdasarkan hasil wawancara di atas, persepsi masyarakat dipengaruhi oleh faktor pengalaman dan pengetahuannya. Kepala Daerah harus memiliki dedikasi yang tinggi untuk mensejahterakan masyarakat, karena seorang Kepala Daerah dipilih tidak hanya untuk duduk manis dan berdiam diri tanpa melakukan apapun, sehingga harus mampu bertanggungjawab kepada mereka yang telah memilihnya, karena seorang Kepala Daerah adalah milik masyarakat. Jadi, sudah sewajarnya jika seorang Kepala Daerah harus mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada masyarakat.

Dedikasi tidak hanya terkait manajerial (penggunaan dana) namun terkait juga dengan proses dan program/ kegiatan yang kesemuanya sejalan. Sehingga seorang Kepala Daerah benar-benar menjalankan pemerintahan milik masyarakat dengan berorientasi kesejahteraan bersama.

Saat menjalankan programnya seharusnya seorang Bupati melakukan peninjauan langsung, sehingga dapat melihat sejauhmana pembangunannya tersebut. Walaupun memberikan utusan untuk melakukan peninjauan tentunya hal itu akan berbeda dengan dilakukan sendiri. Dengan turun langsung ke masyarakat, maka akan dapat langsung berinteraksi dengan masyarakat.

Melakukan interaksi langsung dengan masyarakat merupakan hal yang penting karena dengan turun langsung maka akan dapat mendengar hal apa saja yang perlu diperbaiki sehingga mampu mendatangkan perubahan ke arah yang lebih baik. Menjalin hubungan yang baik dengan masyarakat

bukanlah hal yang buruk, karena jika mampu memenangkan hati masyarakat dan melakukan pembangunan disegala aspek dengan baik maka masyarakat tidak akan segan-segan untuk memilihnya disaat pemilu, karena yang diinginkan masyarakat adalah mendapatkan kehidupan yang lebih baik dan sejahtera.

## 2. Kualitas Layanan

Penilaian masyarakat terkait aspek kualitas layanan adalah sebagai berikut:

Tabel 3.8

Penilaian Responden terkait peningkatan kualitas pelayanan di kantor pemerintah daerah pada masa Bupati Bantul tahun 2010 - 2015

No	Jawaban	Frekuensi	Presentase
1	Sangat Setuju	5	5%
2	Setuju	79	79%
3	Tidak Setuju	14	14%
4	Sangat Tidak Setuju	2	2%
	Jumlah	100	100%

Sumber: Hasil Kuesioner 4

Berdasarkan tabel 3.8 dapat dilihat bahwa penilaian responden terkait peningkatan kualitas pelayanan di kantor pemerintah daerah pada masa Bupati Bantul tahun 2010 - 2015 adalah 5 responden dengan presentase 5% menjawab sangat setuju, kemudian 79 responden dengan presentase 79% menjawab setuju, 14 responden dengan presentase 14% menjawab tidak setuju, dan 2 responden dengan presentase 2% menjawab sangat tidak setuju.

Setelah melakukan perhitungan nilai indeks dari kualitas pelayanan publik di kantor pemerintah daerah adalah 2,87 dengan kategori baik. Selain itu hasil dari kuesioner didukung oleh hasil wawancara dengan 8 orang, 5 orang menjawab setuju sedangkan 3 orang menjawab tidak setuju. Berikut hasil wawancaranya:

Bapak Ramadi (40 tahun, pedagang) mengatakan:

“Kualitas pelayanan yang diberikan pada kantor pemerintahan daerah seperti Kantor Kecamatan dan Kantor Desa cukup baik dan cepat tanggap. Tidak ada prosedur yang berbelit-belit. Semuanya kalau masalah urusan-urusan lancar dan dipermudah. Seperti pembuatan Kartu Tanda Penduduk, kartu keluarga itu tidak perlu menunggu hingga berhari-hari”.

Bapak Rian (30 tahun, Petani) mengatakan:

“Pelayanannya bagus, cepat juga. Selain itu juga sekarang sudah tertib, karena menurut saya efektif dan efisien tentunya kualitas pelayanannya juga meningkat”.

Bapak Sunarto (52 tahun, buruh tani) mengatakan:

“Kualitas pelayanannya sangat bagus, karena sudah mengedepankan kepuasan dari masyarakat. Tidak merepotkan lagi, dan semua prosesnya dipermudah”.

Ibu Maya (29 tahun, Guru) mengatakan:

“Dari segi kualitas pelayanan bagus dan meningkat, karena cepat, tidak membuang-buang waktu, tenaga dan biaya juga”.

Ibu Tatik (32 tahun, ibu rumah tangga) mengatakan:

“Menurut saya sudah meningkat, karena tidak berbeda jauh dengan efektif dan efisien tadi, karena sudah efektif dan efisien tentunya meningkat ke arah yang lebih baik pelayanannya”.

Sedangkan untuk yang tidak setuju jika kualitas pelayanan meningkat, hasil wawancaranya sebagai berikut:

Ibu Mujiati (56 tahun, Ibu Rumah Tangga) berpendapat:

“kualitas pelayanan tidak bagus, membuang-buang waktu dan tidak sungguh-sungguh dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat”.

Hal yang sama disampaikan oleh Ibu Rosida (42 tahun, petani):

“Menurut saya tidak meningkat, karena menyulitkan saya. Jika tidak efektif dan tidak efisien tentunya kualitas pelayanan tidak meningkat”.

Selain itu juga ibu Sri (37 tahun, pedagang) berpendapat bahwa:

“Kualitas pelayanannya tidak meningkat, karena masih menyulitkan masyarakat yang ingin dilayani, kalau sudah membuang waktu, tenaga dan biaya tentunya tidak bagus pelayanannya”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa masyarakat ada yang berpendapat kualitasnya baik namun ada juga yang sebaliknya. Persepsi yang diberikan oleh masyarakat umumnya berdasarkan faktor pengalaman pribadinya, yaitu berdasarkan yang telah mereka alami sendiri atau melihatnya secara langsung, hal itulah yang kemudian tanggapan yang diberikan berbeda-beda.

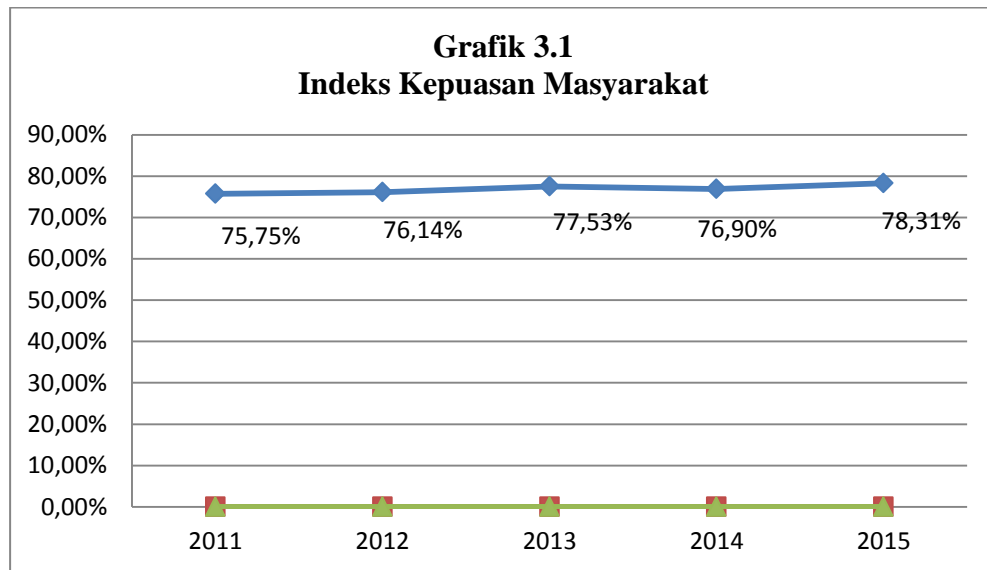
Walaupun terdapat pelayanan yang kurang memuaskan masyarakat tetapi masih ada yang mampu untuk menutupinya yaitu dengan memberikan pelayanan cepat dan tidak “berbelit-belit” yang harus melewati banyak meja baru kemudian dapat diproses. Walaupun masih ada juga kantor yang melayani dengan memberikan pelayanan yang menyusahkan masyarakat.

Pelayanan yang menyusahkan akan membuat masyarakat enggan untuk mengurus sesuai dengan prosedur.

Jika untuk pelayanan di kantor kecamatan dan kantor desa sebenarnya sudah baik karena tidak membutuhkan waktu lama jika mengurus segala-sesuatunya, namun kesalahannya adalah jam kerja pagi tidak ada orang kemudian kantor tutup dengan cepat pada siang hari, sehingga jam kerja menjadi sangat singkat. Akan tetapi, jika masyarakat yang datang pada saat ada pegawainya, maka akan langsung dilayani saat itu juga dan tidak harus menunggu sampai berhari-hari.

Hal yang dapat disimpulkan terkait kualitas pelayanan apakah mengalami peningkatan atau tidak dapat dilihat dari segi efektif dan efisiensi dalam memberikan pelayanan. Jika pelayanan yang diberikan itu efektif dan efisien tentunya masyarakat akan puas, dan apabila masyarakat puas maka hal itu tentunya mempengaruhi kualitas dari pelayanan tersebut, karena jika tidak puas dengan pelayanan yang diberikan maka kualitas pelayanan tidak dapat dikatakan meningkat.

Sementara itu, Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di Kabupaten Bantul mengalami peningkatan, hal ini tentunya sejalan dengan persepsi sebagian besar masyarakat yang mengatakan bahwa kualitas pelayanan mengalami peningkatan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Grafik 3.1 di bawah ini:



Sumber: Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Bantul (2015)

Jika melihat grafik 3.1 di atas nilai indeks kepuasan masyarakat mengalami dinamika, yaitu dari tahun 2011 hingga 2013 mengalami kenaikan, namun di tahun 2014 menurun dan kembali naik di tahun 2015 menjadi 78,31%. Nilai dari IKM tersebut didapat dari rangkuman nilai IKM SKPD pemberi layanan.

Maksud dari dilaksanakannya pengukuran indikator sasaran adalah untuk mengukur indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan. Permasalahan atas sasaran meningkatnya kualitas pelayanan publik yaitu adanya tuntutan kepuasan responden yang semakin tinggi, sedangkan solusi utama mengatasi permasalahan tersebut yaitu dengan semakin meningkatnya kualitas pelayanan publik (Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Bantul, 2015).

Tabel 3.9  
Penilaian Responden terhadap peningkatan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan pada masa Sri Surya Widati tahun 2010-2015

No	Jawaban	Frekuensi	Presentase
1	Sangat Setuju	3	3%
2	Setuju	90	90%
3	Tidak Setuju	7	7%
4	Sangat Tidak Setuju	-	-
	Jumlah	100	100%

Sumber: Hasil Kuesioner 5

Berdasarkan tabel 3.9 penilaian responden terhadap peningkatan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan pada masa Bupati Bantul tahun 2010-2015 adalah 3 responden dengan presentase 3% menjawab sangat setuju, kemudian 90 responden dengan presentase 90% menjawab setuju, dan 7 responden dengan presentase 7% menjawab tidak setuju.

Penilaian masyarakat terhadap peningkatan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan cukup positif, yaitu sebanyak 93% setuju bahwa selama masa jabatan Bupati Bantul 2010-2015 mengalami peningkatan dalam hal sarana dan prasarana pelayanan kesehatan. Setelah melakukan perhitungan nilai indeks yang diperoleh adalah 2,96 dengan kategori baik. Hasil dari kuesioner tersebut juga didukung oleh hasil wawancara dengan 10 orang, 8 orang menyatakan setuju dan 2 orang menyatakan tidak setuju. Untuk hasil wawancaranya sebagai berikut:

Ibu Tatik (32 tahun, Ibu rumah tangga) beliau mengatakan:

“Sekarang itu sarana dan prasaran kesehatan itu sudah bagus mbak, peralatannya juga sudah lengkap, selain itu juga ruang tunggu yang disediakan sudah banyak jadi kalau antri nggak berdiri lagi.”

Bpk Tri (57 tahun, PNS) beliau mengatakan:

“Jika dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, Puskesmas di sini sudah banyak kemajuan dalam hal sarana prasarana. Hal ini tentu dilakukan agar masyarakat dapat merasa puas dan nyaman saat akan berobat”.

Bapak Ramadi (40 tahun, Pedagang) beliau mengatakan:

“Kalau sekarang Puskesmas udah lumayan mbak, daripada yang dulu. Sekarang udah ada ruang rawat inap juga. Jadi kalau ada yang butuh dirawat tidak perlu lagi jauh-jauh ke Rumah Sakit. Tempatnya juga lebih nyaman. Masalah ruang tunggu, sebenarnya udah banyak tapi yang namanya pengunjung juga tidak tau waktu, pas lagi banyak ya ruang tungguanya kurang. Tapi kalau pas nggak terlalu banyak pengunjung ya aman-aman saja”.

Ibu Ratna (42 tahun, PNS) mengatakan:

“Untuk Puskesmas sudah bagus sekarang dan sudah menyediakan ruang rawat inap, jadi sangat membantu masyarakat”.

Ibu Mujiati (56 tahun, ibu rumah tangga) mengatakan:

“Kalau untuk rumah sakit dan yang lainnya saya kurang paham mbak karena tidak pernah ke sana, tetapi kalau untuk Puskesmas sudah bagus dan nyaman karena diperluas juga sekarang”.

Bapak Sunarto (52 tahun, buruh tani) mengatakan:

“Karena saya tidak pernah ke Puskesmas atau ke rumah sakit saya kurang paham mbak, tetapi kalau berdasarkan orang-orang yang cerita katanya sudah bagus sekarang, dan tempatnya lebih nyaman juga”.

Bapak Rian (30 tahun, petani), mengatakan:

“Sarana dan prasarana lebih banyak dan lebih baik juga jika dibandingkan dengan sebelumnya, karena diperluas jadi lebih nyaman ketika berobat”.

Ibu Rosida (42 tahun, petani) mengatakan:



“Sudah semakin baik, tempatnya lebih nyaman juga buat pasien dan ada tambahan ruang rawat inap juga”.

Sedangkan hasil wawancara untuk yang tidak setuju jika lebih baik adalah:

Ibu Maya (29 tahun, guru) mengatakan bahwa:

“Sebenarnya lebih ke kuantitas dokternya yang kurang, jadi antriannya itu terkadang sangat panjang karena yang menangani terbatas”.

Ibu Sri (37 tahun, pedagang) mengatakan:

“tempat yang tersedia belum ramah terhadap kaum difabel, jadi hanya untuk orang-orang yang normal saja yang mampu untuk nyaman”.

Berdasarkan hasil dari wawancara tersebut terlihat respon positif dari masyarakat, karena dari 10 orang yang diwawancarai, 8 orang menyatakan adanya peningkatan sarana dan prasarana kesehatan seperti, perluasan ruang di Puskesmas, ruang tunggu yang semakin luas, adanya ruang rawat inap, dan tempat yang semakin nyaman. Namun ada juga yang mengatakan tidak meningkat karena belum mendukung kaum difabel dan jumlah dokter yang masih kurang.

Perbedaan pendapat di masyarakat sangatlah wajar karena persepsi masyarakat dipengaruhi oleh berbagai hal, seperti salah satu hasil dari wawancara di atas ada narasumber yang menyatakan baik namun tidak pernah datang dan melihat langsung. Penilaiannya hanya dengan cara mendengar atau mendapatkan informasi dari pihak lain. Persepsi seperti ini disebut dengan *social relationship*, yaitu penilaian yang dipengaruhi oleh

keakraban dengan orang lain yang dipercayai (pertemanan), kemudian mengikuti dan meyakini meskipun dengan dasar “katanya”. Tidak hanya itu saja, dalam memberikan persepsi terkait sarana dan prasarana kesehatan juga dipengaruhi oleh faktor pengalaman

Walaupun demikian, jika melihat pendapat dari 8 orang tersebut sudah adanya perubahan yang terjadi di puskesmas Kretek. Pentingnya perbaikan sarana dan prasarana selain untuk kenyamanan, juga untuk kepuasan masyarakat yang sedang berobat. Untuk membuat pasien merasa nyaman itu sangat penting, karena orang yang sedang sakit itu sangat sensitif dan ingin merasa tenang serta nyaman agar tidak terlalu merasakan sakit yang dideritanya tersebut.

Selain itu adanya penambahan ruang rawat inap sangat membantu masyarakat karena jika ada yang butuh perawatan tidak perlu pergi jauh ke rumah sakit. Hal itu sangat memudahkan masyarakat dan juga dapat memberikan pertolongan dengan cepat.

Tabel 3.10

Penilaian Responden terhadap peningkatan Kualitas pelayanan kesehatan pada masa Bupati Bantul tahun 2010-2015

No	Jawaban	Frekuensi	Presentase
1	Sangat Setuju	5	3%
2	Setuju	95	90%
3	Tidak Setuju	-	5%
4	Sangat Tidak Setuju	-	2%
	Jumlah	100	100%

Sumber: Hasil Kuesioner 6

Berdasarkan tabel 3.10 penilaian responden terhadap peningkatan kualitas pelayanan kesehatan pada masa Bupati Bantul tahun 2010 - 2015 adalah 5 responden dengan presentase 5% menjawab sangat setuju, 95 responden dengan presentase 95 % menjawab setuju.

Setelah melakukan perhitungan nilai indeks yang diperoleh terkait peningkatan kualitas pelayanan kesehatan adalah 3,05 dengan kategori baik. Hasil dari kuesioner tersebut 100% masyarakat setuju jika kualitas pelayanan kesehatan mengalami peningkatan. Hal itu didukung oleh hasil dari wawancara dengan 5 orang, dan semuanya menyatakan setuju jika kualitas pelayanan kesehatan meningkat.

Ibu Sri (37 tahun, pedagang) beliau mengatakan:

“Sekarang kalau mau berobat pelayanannya sudah bagus, sudah tidak berbelit-belit lagi prosedurnya. Jadi kalau dulu pas bagian pendaftaran itu lama tapi sekarang udah cepet, pokoknya tambah baik pelayanannya.”

Ibu Tatik (32 tahun, ibu rumah tangga), beliau mengatakan:

“Dalam hal pelayanan dokternya sebenarnya dulu juga udah bagus mbak, tapi kendala pada bagian pendaftaranya yang lama, mungkin karena dulu tenaga kerjanya cuma sedikit dan sekarang sudah banyak jadi bisa lebih cepet”.

Bapak Ramadi (40 tahun, Pedagang) mengatakan bahwa:

“Terkait kualitas pelayanan kesehatan ya standar, cepet, dipermudah juga. Nggak berbelit-belit kalau datang ya bisa langsung daftar kemudian, antri untuk masuk ke ruang dokternya dan kalau sudah selesai pemeriksaan tinggal antri untuk pengambilan obatnya. Untuk biaya yang dikenakan juga wajar-wajar saja tidak terlalu mahal”.

Ibu Maya (29 tahun, guru) mengatakan:

“Pelayanan kesehatan sudah bagus, karena ada vaksinasi bagi balita dan anak sekolah, selain itu juga adanya imunisasi rutin dan tambahan makanan dan vitamin buat anak-anak”.

Bapak Rian (30 tahun, petani) mengatakan:

“Pelayanan kesehatan meningkat, semakin cepet pelayanannya. Prosedurnya juga mudah”.

Persepsi yang diberikan oleh masyarakat berdasarkan faktor pengalaman pribadinya. Berdasarkan hasil dari wawancara di atas masyarakat setuju jika kualitas pelayanan kesehatan meningkat, hal itu dibuktikan dengan jawaban positif dari masyarakat bahwa pelayanan administratif dan pelayanan dari dokter juga baik. Selain itu juga mereka dilayani dengan cepat karena prosedurnya yang mudah. Kepuasan yang diterima oleh masyarakat sangatlah penting, karena kesehatan merupakan hal yang utama harus diperhatikan. Tanpa kesehatan seorang manusia tidak akan mampu berbuat apapun.

Tidak hanya itu saja, di dalam peningkatan kualitas pelayanan kesehatan yang diperlukan adalah ketersediaan tenaga kesehatan, yaitu kecukupan tenaga kesehatan dengan masyarakat yang dilayani baik secara kuantitas maupun kualitas menjadi faktor penting dalam pembangunan kesehatan. Hal ini juga perlu diikuti dengan kelengkapan sarana pelayanan kesehatan, mekanisme sistem rujukan yang efektif dan efisien sesuai dengan kewenangan medis, birokrasi pelayanan kesehatan yang sederhana dan

perilaku lingkungan pelayanan kesehatan (Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Bantul, 2015).

Untuk mendapatkan kualitas pelayanan kesehatan yang maksimal tentunya didukung oleh ketersediaan sarana dan prasarana, karena tanpa adanya sarana dan prasarana seorang dokter pun akan sulit melakukan tindakan. Oleh karena itu, antara ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan dan kualitas pelayanan kesehatan harus berjalan beriringan dan saling melengkapi.

### 3. Responsivitas

Penilaian masyarakat terkait aspek responsivitas adalah sebagai berikut:

Tabel 3.11

Penilaian Responden terhadap peningkatan jumlah penduduk yang memiliki jaminan kesehatan pada masa Sri Surya Widati tahun 2010-2015

No	Jawaban	Frekuensi	Presentase
1	Sangat Setuju	2	2%
2	Setuju	34	34%
3	Tidak Setuju	63	63%
4	Sangat Tidak Setuju	1	1%
	Jumlah	100	100%

Sumber: Hasil Kuesioner 7

Berdasarkan tabel 3.11 penilaian responden terhadap peningkatan jumlah penduduk yang memiliki jaminan kesehatan pada masa Bupati Bantul tahun 2010-2015 adalah 2 responden dengan presentase 2% menjawab sangat setuju, kemudian 34 responden dengan presentase 34%

menjawab setuju, 63 responden dengan presentase 63% menjawab tidak setuju, dan 1 responden dengan presentase 1% menjawab sangat tidak setuju.

Setelah melakukan perhitungan nilai indeks yang diperoleh terkait peningkatan jumlah penduduk yang memiliki jaminan kesehatan adalah 2,37 dengan kategori kurang baik. Data dari kuesioner tersebut didukung oleh hasil dari wawancara langsung dengan masyarakat. Dari 10 orang yang diwawancarai 6 orang menjawab setuju jika meningkat sedangkan 4 orang lainnya menjawab tidak setuju jika meningkat. Hasil wawancaranya sebagai berikut:

Bapak Rian (30 tahun, petani) mengatakan bahwa:

“Jaminan kesehatan itu ada mbak, tapi ada yang daftar sendiri ada yang dikasih dari pemerintah. Kalau yang nggak dapat ya bisa mendaftarkan diri. Untuk masalah merata atau tidaknya saya kurang tahu, tapi saya dapat”.

Bapak Ramadi (40 tahun, pedagang) mengatakan bahwa:

“Untuk Jaminan Kesehatan itu ada diberi oleh pemerintah. Kalau yang diberi itu umumnya untuk yang tidak mampu. Sebelumnya didata dulu setelah didata baru dikasih. Banyak yang dapat juga itu, walaupun ada juga yang nggak dapat karena kelompotan jadi nggak kebagian, dan itu diberikan secara cuma-cuma tidak ada pungutan sepeser pun.

Ibu Maya (29 tahun, guru) mengatakan:

“Kalau setau saya jaminan kesehatan itu ada mbak, untuk yang kurang mampu di kasih secara gratis, tetapi masalah yang dapat rata atau tidak kurang paham juga”.

Ibu Sri (37 tahun, pedagang) mengatakan:

“Kartu jaminan kesehatan ada kok mbak, saya dapat juga tapi “ketelisut” (lupa menyimpannya), soalnya kalau bisa kan ya nggak pakai kartu-kartu juga biar sehat terus. Lingkungan disini karena perekonomiannya tidak terlalu ke bawah, tapi ya dapat juga. Kalau masalah pembagiannya merata atau tidak saya tidak tau, karena didata baru kemudian diberikan ke yang bersangkutan. Mungkin ada juga yang tidak dapat karena kelompotan saat didatanya”.

Bapak Sunarto (52 tahun, buruh tani) mengatakan:

“Jaminan kesehatan ada, sebelumnya didata kemudian diberikan ke yang bersangkutan. Tetapi yang namanya orang pasti ada salahnya, ada juga yang nggak ke data dan tidak kebagian.

Ibu Ratna (42 tahun, PNS) mengatakan:

“Jaminan kesehatan ada macam-macam. Tetapi yang terutama untuk masyarakat yang kurang mampu. sebelumnya didata kemudian diberikan secara gratis”.

Sedangkan yang tidak setuju jika jaminan kesehatan meningkat, hasil wawancaranya sebagai berikut:

Ibu Mujiati (56 tahun, ibu rumah tangga) mengatakan:

“Jaminan kesehatan menurut saya tidak meningkat, karena saya sendiri tidak dapat. Memang tidak mengharapkannya karena biar selalu sehat, kalau pun dapat ya semoga tidak dipakai. Tetapi katanya untuk kalangan bawah tapi kok tidak ikut didata”.

Ibu Tatik (32 tahun, ibu rumah tangga) mengatakan:

“Saya tidak dapat itu mbak. Berarti ya tidak meningkat juga. Seharusnya kan merata, kalau merata dan tepat sasaran itu menurut saya baru meningkat”.

Bapak Tri (57 tahun, PNS) mengatakan:

“Untuk jaminan kesehatan memang ada programnya, tetapi masalahnya yang mendata itu tidak tepat sasaran, yang mampu dikasih yang harusnya dapat malah nggak masuk didata. Ini kan yang dinamakan “ngawur”. Seharusnya tidak begitu, yang benar itu meningkat dan tepat sasaran, sehingga yang benar-benar membutuhkan itu mampu merasakan manfaatnya”.

Ibu Rosida (42 tahun, petani) mengatakan:

“Jaminan kesehatan itu ada mbak, tapi nggak tepat sasaran. Seperti tetangga belakang situ yang punya mobil tapi dapat dari pemerintah, sedangkan tetangga depan saya itu yang jelas-jelas membutuhkan malah nggak dapat. Ketika ditanyakan disuruh tanya ke atasannya, ketika tanya ke atas diminta tanya ke bagian bawah karena mereka yang mendata. Jadi saling lempar nggak ada kejelasan. Kalau saya sendiri juga tidak dapat, tetapi juga tidak mengharapkan, walaupun mbaknya juga bisa lihat sendiri jika dilihat keadaanya juga seperti ini”.

Persepsi yang diberikan masyarakat terkait jaminan kesehatan dipengaruhi oleh faktor pengalaman dan pengetahuan. Kesimpulan yang dapat diambil adalah sebenarnya ada kartu jaminan kesehatan masyarakat (jamkesmas) yang diberikan ke masyarakat secara cuma-cuma untuk masyarakat yang kurang mampu. Tetapi hasil pendataannya tidak merata sehingga ada yang dapat dan ada yang tidak. Namun yang cukup mengecewakan adalah saling melemparkan tanggungjawab antara yang mendata dan yang memberikan perintah untuk mendata, sehingga tidak ada kejelasan untuk masyarakat harus memberikan aduan kemana.

Pendataan yang dilakukan seharusnya lebih transparan dan tepat sasaran sehingga yang benar-benar membutuhkan bisa mendapatkan haknya. Bukannya saling melempar tanggungjawab dan karena faktor



kedekatan dengan yang mendaftarkan kemudian yang mendapatkan fasilitas tersebut. Hal ini tidak seharusnya terjadi jika mereka peka terhadap keadaan sosial di masyarakat. Setiap masyarakat memiliki tingkat perekonomian yang berbeda-beda, jika mereka membutuhkan itu tandanya memang butuh dan harusnya hak yang harus didapat benar-benar diberikan bukan diberikan kepada pihak lain yang tidak membutuhkan.

Bagi sebagian orang mungkin jamkesmas ini tidak terlalu penting karena ekonomi yang sudah mapan. Tetapi untuk masyarakat yang memiliki perekonomian menengah ke bawah adanya bantuan tersebut sangat membantu karena mampu untuk meringankan beban yang harus dibayar ketika berobat. Sehingga seharusnya hal-hal seperti “kelompatan” dalam mendaftarkan itu tidak perlu terjadi.

Sementara itu, di luar dari persepsi masyarakat adanya data terkait kepesertaan jaminan kesehatan tahun 2015. Pada tabel tersebut tidak 100% masyarakat mendapatkan kartu jamkesmas. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 3.12 di bawah ini:

Tabel 3.12

## Data Kepesertaan Jaminan Kesehatan Tahun 2015

No	Jenis Kepesertaan	Jumlah Peserta (Jiwa)
1	BPJS	
	a. Penerima Bantuan Iur (PBI)	472.442
	b. Non PBI	203.885
2	Jamkesda	220.000
3	Jamkessos	50.000
Jumlah		946.327
Presentase		97,69%

Sumber: Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Bantul (2015)

Jika dilihat dari tabel 3.12 total persentasenya adalah 97,69% itu tandanya masih ada 2,31% yang tidak mendapatkan jaminan kesehatan tersebut. Penulis mengasumsikan bahwa 2,31% tersebut salah satunya adalah masyarakat yang tidak masuk dalam data pemberian jamkesmas. Untuk itu diharapkan agar masyarakat yang berhak dan membutuhkan dapat segera mendapatkan kartu jamkesmas tersebut.

Tabel 3.13

## Penilaian Responden terhadap peningkatan kualitas pendidikan pada masa Bupati Bantul tahun 2010-2015

No	Jawaban	Frekuensi	Presentase
1	Sangat Setuju	5	5%
2	Setuju	85	85%
3	Tidak Setuju	10	10%
4	Sangat Tidak Setuju	-	-
	Jumlah	100	100%

Sumber: Hasil Kuesioner 8

Berdasarkan tabel 3.13 penilaian responden terhadap peningkatan kualitas pendidikan pada masa Bupati Bantul tahun 2010-2015 adalah 5

responden dengan presentase 5% menjawab sangat setuju, kemudian 85 responden dengan presentase 85% menjawab setuju, dan 10 responden dengan presentase 10% menjawab tidak setuju.

Berdasarkan hasil kuesioner nilai indeks untuk kualitas pendidikan mencapai 2,95 hal ini dalam kategori baik. Selain itu, data dari kuesioner tersebut didukung oleh hasil dari wawancara, dari 7 orang yang diwawancarai, 5 orang menyatakan setuju kualitas pendidikan meningkat dan 2 orang menyatakan tidak setuju. Hasil wawancaranya sebagai berikut:

Ibu Sri (37 tahun, pedagang) mengatakan:

“Untuk kuantitas pendidikan kalau saya lihat ya meningkat mbak, banyak yang sekolah tapi pengangguran ya banyak juga. Untuk biaya pendidikan ya saya kira wajar-wajar saja kalau sekolah di Negeri. Tapi kalau di swasta udah lain ceritanya. Tapi walaupun begitu ya lumayan lebih baik daripada yang dulu.

Ibu Maya (29 tahun, guru) mengatakan:

“Kualitas pendidikan menurut saya meningkat, karena guru juga berusaha untuk memberikan pembelajaran yang lebih baik. Selain itu juga guru sekarang lebih disiplin dalam mengajar, sehingga mampu untuk mengajar lebih baik lagi. Karena bagaimanapun seorang tenaga pengajar akan berusaha membuat anak didiknya mampu bersaing di dunia luar”.

Bapak Ramadi (40 tahun, Pedagang) beliau mengatakan:

“Kalau pendidikan ya sewajarnya saja, nggak terlalu menonjol juga. Maksudnya ya yang sekolah banyak juga kayak biasanya, kan memang sudah ada wajib belajar. Masalah kualitasnya sama aja kayak di daerah-daerah lain pada umumnya. Dibilang baik ya baik, tapi nggak baik banget, standarlah”.

Ibu Ratna (42 tahun, PNS) mengatakan:

“Kualitas pendidikannya saya rasa meningkat karena anak-anak yang lulus SMA itu mampu bersaing dengan anak-anak dari luar ketika masuk dalam Perguruan Tinggi Negeri. Selain karena faktor pribadi si anak, itu juga merupakan peran dari sekolahnya”.

Bapak Sunarto (52 tahun, buruh tani) mengatakan:

“Kualitas pendidikan menurut saya meningkat mbak, saya katakan meningkat karena kualitas dari tenaga pengajarnya juga meningkat, para guru itu juga melakukan pelatihan dan mencoba metode belajar yang baru dan lebih efektif sehingga anak didiknya mampu mengerti setiap yang diajarkan”.

Sedangkan masyarakat yang tidak setuju jika kualitas pendidikan meningkat sebagai berikut:

Ibu Tatik (32 tahun, ibu rumah tangga):

“Menurut saya ya sama saja mbak, nggak meningkat juga kualitas pendidikannya. Kalau kualitas pendidikan meningkat pasti angka pengangguran menurun. Ini sama saja yang lulus sekolah ya menganggur”.

Bapak Tri (57 tahun, PNS) mengatakan:

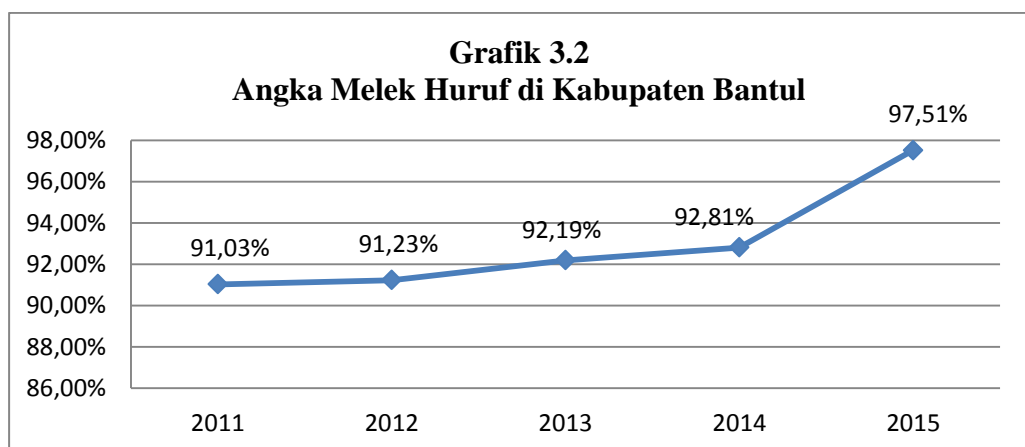
“Kualitas pendidikan saya lihat ya gitu-gitu aja, ya nggak meningkat juga. Lebih bagusya kan sekolah itu mampu untuk mengajarkan keterampilan ke anak didiknya. Jadi tidak hanya yang di Kejuruan tetapi di Sekolah Umum juga bisa menerapkan, karena menurut saya *skill* itu sangat penting, dan untuk memasuki dunia kerja selain pengetahuan *skill* juga merupakan hal yang diutamakan”.

Persepsi yang diberikan oleh masyarakat terkait kualitas pendidikan dipengaruhi oleh faktor pengalaman dan pengetahuan. Jika membahas hasil dari kuesioner dan wawancara tersebut maka kualitas pendidikan di Kabupaten Bantul khususnya di Kecamatan Kretek mengalami peningkatan. Peningkatannya berupa anak didik yang mampu untuk bersaing ketika lulus

sekolah, selain itu juga tenaga pendidik lebih disiplin dan memiliki metode pengajaran yang baru dan lebih efektif sehingga dapat dengan mudah dipahami oleh siswa/siswi.

Walaupun demikian tetap saja ada kekurangannya yaitu masih banyaknya lulusan SMA yang menganggur, hal itulah yang kemudian diungkapkan oleh Bapak Tri, yaitu akan lebih bagus apabila sekolah umum juga memberikan pelajaran terkait keterampilan, sehingga ketika lulus sekolah tidak akan sulit untuk mendapatkan pekerjaan. Hal ini tentunya sulit untuk terealisasi karena tidak sesuai dengan kurikulum pendidikan yang berlaku, jika ingin mendapatkan keterampilan yang lebih maka disarankan untuk masuk di Sekolah Menengah Kejuruan.

Walaupun persepsi dari masyarakat beraneka ragam namun, angka melek huruf di Kabupaten Bantul mengalami peningkatan setiap tahunnya. Hal ini tentunya menandakan bahwa kualitas pendidikan mengalami peningkatan. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat dari grafik 3.2 di bawah ini:



Sumber: Pemerintah Kabupaten Bantul (2015)

Angka melek huruf dari tahun 2011 hingga tahun 2015 mengalami peningkatan. Jika ditahun 2011 sebanyak 91,03%, kemudian ditahun 2012 menjadi 91,23%, di tahun 2013 meningkat menjadi 92,19%, tahun 2014 mengalami peningkatan menjadi 92,81%, dan di tahun 2015 terjadi peningkatan yang cukup signifikan menjadi 97,51%.

Angka melek huruf merupakan tingkat atau kemampuan untuk membaca oleh seorang individu. Jika seorang mampu membaca maka akan lebih mudah dalam membuka akses kehidupan, karena membaca merupakan hal yang sangat penting, tanpa membaca seseorang akan sulit untuk belajar dan memahami sesuatu.

Pendidikan merupakan hal yang paling penting karena dapat menambah pengetahuan tentang berbagai hal dan dapat memberikan pandangan bagi kehidupan. Selain itu, dengan pendidikan dapat membangun karakter dan mengajarkan sopan santun dalam berperilaku. Pendidikan juga membantu kemajuan bangsa, karena masa depan bangsa akan aman di tangan masyarakat yang berpendidikan, karena pendidikan sangat penting bagi pertumbuhan ekonomi dan pembangunan sosial.

Kaitannya dengan pertumbuhan ekonomi adalah seorang yang berpendidikan akan memiliki kehidupan yang lebih baik karena mereka akan berfikir bagaimana agar hidupnya mampu untuk maju, dengan demikian perekonomian keluarga membaik. Jika perekonomian keluarga

membaik maka akan berpengaruh juga terhadap menurunnya angka kemiskinan.

Sedangkan kaitannya dengan pembangunan sosial adalah masyarakat yang berpendidikan dapat dengan mudah membaur dalam masyarakat luas dan berinteraksi dengan orang baru. Tidak hanya itu saja, pendidikan juga mampu untuk meningkatkan kualitas dari SDM sehingga mampu untuk bersaing di dunia luar, hal itu untuk mencapai kesejahteraan. Untuk itu, maka tidak salah jika pendidikan merupakan hal yang sangat sentral dan paling ditekankan oleh pemerintah baik pusat maupun daerah.

Untuk itu kualitas pendidikan sangatlah penting karena pendidikan yang berkualitas akan menciptakan SDM yang handal dan berdaya saing tinggi. Pendidikan yang baik mampu untuk membangun bidang lainnya, karena pada hakikatnya pembangunan bukan hanya berkaitan dengan bangunan fisik dan gedung, tetapi juga pembangunan sosial, ekonomi, kesehatan, dan pendidikan.

Tabel 3.14

Penilaian Responden terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah pada masa Sri Surya Widati tahun 2010-2015

No	Jawaban	Frekuensi	Presentase
1	Sangat Setuju	2	2%
2	Setuju	77	77%
3	Tidak Setuju	19	19%
4	Sangat Tidak Setuju	2	2%
	Jumlah	100	100%

Sumber: Hasil Kuesioner 9

Berdasarkan tabel 3.14 penilaian responden terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah pada masa Bupati Bantul tahun 2010-2015 adalah 2 responden dengan presentase 2% menjawab sangat setuju, kemudian 77 responden dengan presentase 77% menjawab setuju, 19 responden dengan presentase 19% menjawab tidak setuju, dan 2 responden dengan presentase 2% menjawab sangat tidak setuju.

Nilai indeks untuk pertumbuhan ekonomi adalah 2,79 dengan kategori baik. Data dari kuesioner tersebut didukung oleh hasil dari wawancara dengan 3 orang masyarakat, 2 orang menjawab setuju dan 1 orang menjawab tidak setuju. Hasil wawancaranya sebagai berikut:

Bapak Ramadi (40 tahun, pedagang) mengatakan:

“Pertumbuhan ekonomi saya rasa stabil-stabil saja, tidak ada krisis atau gimana. Alhamdulillah adem ayem. Saya lihat masyarakat sekitar juga tidak ada keluhan. Intinya sama saja tidak menurun juga tidak meningkat”.

Ibu Maya (32 tahun, guru) mengatakan:

“selama ini pertumbuhan ekonomi stabil-stabil saja, tidak pernah ada krisis atau kesulitan bahan pokok”.

Sedangkan yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak meningkat adalah:

Ibu Rosida (42 tahun, petani) mengatakan:

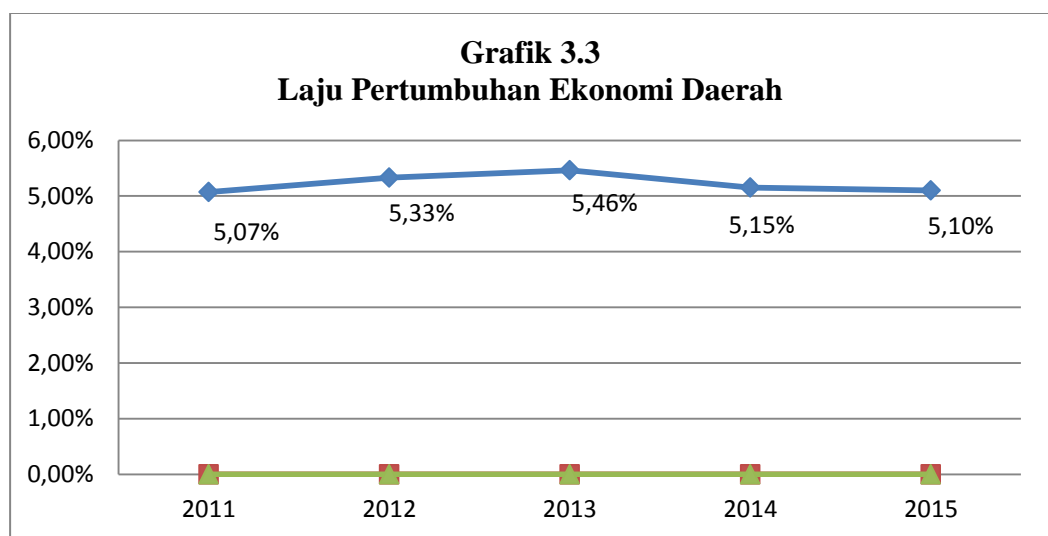
“selama ini sama saja mbak, selama 5 tahun kepemimpinan Bupati tidak ada perubahan yang signifikan. Ya semuanya mengalir seperti biasanya saja.

Berdasarkan pendapat di atas, masyarakat ada yang menyatakan meningkat dan ada pula yang menyatakan biasa saja. Faktor yang



mempengaruhi persepsi masyarakat terkait pertumbuhan ekonomi adalah faktor pengalaman dan pengetahuan. Hal itu sesuai dengan apa yang dialami sendiri oleh masyarakat yang bersangkutan.

Berikut laju pertumbuhan ekonomi daerah di Kabupaten Bantul dari tahun 2011 – 2015:



Sumber: Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Bantul (2015)

Jika dilihat dari Grafik 3.3 pertumbuhan ekonomi mengalami dinamika setiap tahunnya, hal ini disebabkan karena sebagian besar sektor mengalami pertumbuhan positif namun sebagian lainnya mengalami perlambatan. Sumber utama pertumbuhan ekonomi tahun 2015 di Kabupaten Bantul terutama didukung oleh kinerja pada sektor konstruksi, jasa perusahaan, komunikasi, *real estate*, penyediaan akomodasi dan makan minum, jasa pendidikan, perdagangan besar dan eceran dan jasa-jasa yang mengalami laju pertumbuhan yang lebih baik dibandingkan tahun 2014. Adapun sektor industri pengolahan sebagai penyumbang terbesar kedua

dalam aktivitas perekonomian Kabupaten Bantul mengalami perlambatan laju pertumbuhan (Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Bantul, 2015).

Pertumbuhan ekonomi daerah dan pemerataan pendapatan menjadi salah satu penanda keberhasilan pembangunan terutama dari aspek ekonomi. Walaupun pendekatan pembangunan telah mengalami perkembangan yang lebih melihat pentingnya pengembangan kapabilitas manusia, namun aspek ekonomi yang diwakili oleh pertumbuhan ekonomi tetaplah menjadi bagian kunci dalam pembangunan itu sendiri.

Tabel 3.15

Penilaian Responden terhadap pengembangan pariwisata yang dilakukan Bupati Bantul 2010-2015 mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat

No	Jawaban	Frekuensi	Presentase
1	Sangat Setuju	2	2%
2	Setuju	52	52%
3	Tidak Setuju	44	44%
4	Sangat Tidak Setuju	2	2%
	Jumlah	100	100%

Sumber: Hasil Kuesioner 10

Berdasarkan tabel 3.15 penilaian responden terhadap pengembangan pariwisata yang dilakukan Bupati Bantul 2010-2015 mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat adalah 2 responden dengan presentase 2% menjawab sangat setuju, 52 responden dengan presentase 52% menjawab setuju, kemudian 44 responden dengan presentase 44% menjawab tidak setuju, dan 2 responden dengan presentase 2% menjawab sangat tidak setuju.

Nilai indeks terkait pengembangan pariwisata yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat adalah 2,54 dengan kategori baik. Data kuesioner tersebut didukung oleh hasil dari wawancara dengan masyarakat, dari 6 orang yang diwawancarai 3 orang menjawab setuju dan 3 orang lainnya menjawab tidak setuju. Hasil wawancaranya sebagai berikut:

Bapak Ramadi (40 tahun, Pedagang) berpendapat bahwa:

“Kemajuan sektor pariwisata umumnya dirasakan oleh masyarakat yang berada di Parangtritis khususnya pedagang yang berjualan di sana. Kalau masyarakat berjualan di sepanjang jalan Parangtritis itu tidak mendapat dampak signifikan, kecuali pedagang untuk oleh-oleh yang bekerjasama dengan bus-bus pariwisata mereka itu yang merasakan dampaknya. Tetapi kalo masyarakat yang biasa-biasa saja ya sama aja, karena kan mata pencahariannya bukan dari pariwisata. Kalo melihat secara umum memang mensejahterakan masyarakat tetapi perlu digaris bawahi ‘masyarakat yang terlibat langsung yang merasakan dampaknya’. Walaupun saya tidak merasakan dampaknya ya saya tetap bilang setuju jika pariwisata mampu mensejahterakan masyarakat, karena yang saya lihat masyarakat pada umumnya. Selain itu dari pariwisata tersebut juga masuk ke dalam Pendapatan Asli Daerah nantinya juga masyarakat yang merasakan jika dananya dialokasikan untuk pembangunan daerah”.

Ibu Sri (37 tahun, Pedagang) berpendapat bahwa:

“Pengembangan Pariwisata memberikan dampak untuk perekonomian saya. Dari hasil jualan ya lumayan, selain itu juga untuk penginapan dan jasa toilet umum juga ada hasilnya, karena mau bertani nggak punya lahan, adanya cuma ini. Ya alhamdulillah sangat membantu”.

Bapak Rian (30 tahun, petani) mengatakan:

“Adanya pengembangan pariwisata menurut saya mampu untuk mensejahterakan masyarakat, walaupun tidak dirasakan langsung tetapi hasil dari retribusi kemudian menambah PAD itu nantinya juga akan kembali ke masyarakat. Terlebih lagi tempat pariwisata berada di Kecamatan Kretek tentunya akan lebih memperhatikan masyarakat yang ada disekitarnya”.

Sedangkan masyarakat yang tidak setuju jika pengembangan pariwisata mampu mensejahterakan adalah sebagai berikut:

Ibu Rosida (42 tahun, petani) mengatakan:

“Kalau dampak langsung tidak ada mbak, ya sama saja. Masih gini-gini aja. Lagian saya bekerja di sektor pertanian, jadi tidak ada dampak apa-apa”.

Ibu Mujiati (56 tahun, ibu rumah tangga) beliau mengatakan:

“Sektor pariwisata menurut saya dampaknya tidak untuk seluruh kelurahan, tetapi lebih tepatnya untuk yang di Parangtritis. Kalau disini (Tirtohargo) ya nggak ada dampak apa-apa, ya biasa-biasa saja kan jauh juga dari tempat wisatanya”.

Pendapat yang sama disampaikan oleh Ibu Tatik (32 tahun, ibu rumah tangga) mengatakan bahwa:

“Menurut saya yang lebih merasakan dampaknya ya yang dekat pantai, kalau disini tidak ada dampaknya sama sekali. Lagipula wisatawan perginya cuma sekitaran pantai saja, yang sejahtera ya pedagang yang ada disana, kalau masyarakat di luar ya sama aja, tidak ada dampak langsungnya”.

Tabel 3.16

Jumlah Kunjungan Wisatawan dan PAD Sektor Pariwisata  
Tahun 2011 – 2015

Tahun	Jumlah Wisatawan	Jumlah PAD (Rp.)
2011	1.740.417	5.289407.718,00
2012	2.356.578	8.640.795.116,00
2013	2.153.404	9.120.764.368,00
2014	2.298.351	9.767.144.025,00
2015	2.500.114	11.150.632.500,00

Sumber: Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Bantul (2015)

Jika dilihat dari tabel di atas jumlah pengunjung tiap tahun mengalami peningkatan selain mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, sektor Pariwisata juga mampu meningkatkan perekonomian masyarakat di

Kecamatan Kretek, khususnya yang berada di Kelurahan Parangtritis. Kelurahan inilah yang sering dikunjungi oleh wisatawan yang berkunjung ke Pantai Parangtritis, Landasan Pacu, Pantai Depok, dan Gumuk Pasir Parang Kusumo. Tempat-tempat wisata ini sangat digemari oleh wisatawan sehingga tidak hanya akhir pekan namun di hari biasapun juga didatangi banyak pengunjung.

Walaupun demikian ternyata tidak semua masyarakat dapat merasakan langsung dampak dari pengembangan pariwisata yang ada di Kecamatan Kretek. Seperti halnya masyarakat yang hidup jauh dari kawasan pantai tentu tidak mampu mendapatkan dampak langsung, sehingga mereka hanya mampu untuk dapat menikmati dampak tidak langsungnya, yakni hasil dari PAD yang kemudian digunakan untuk melakukan pembangunan baik pembangunan berupa fisik, kesehatan, sosial, pendidikan dan ekonomi.

Jika demikian masyarakat Kretek tidak menjadi satu-satunya mendapatkan dampak tidak langsung namun juga seluruh masyarakat di Kabupaten Bantul, karena kita ketahui bahwa pembangunan di sebuah wilayah akan merata dengan proses yang bergiliran. Hal itu untuk mendapatkan keseimbangan pembangunan dan pemerataan untuk setiap unit wilayahnya.

Tabel 3.17

Penilaian Responden terhadap peningkatan ketahanan pangan di daerah  
pada masa Sri Surya Widati tahun 2010-2015

No	Jawaban	Frekuensi	Presentase
1	Sangat Setuju	1	1%
2	Setuju	86	86%
3	Tidak Setuju	13	13%
4	Sangat Tidak Setuju	-	-
	Jumlah	100	100%

Sumber: Hasil Kuesioner 11

Berdasarkan tabel 3.17 penilaian responden terhadap peningkatan ketahanan pangan di daerah pada masa Bupati Bantul tahun 2010-2015 adalah 1 responden dengan presentase 1% menjawab sangat setuju, kemudian 86 responden dengan presentase 86% menjawab setuju, dan responden dengan presentase 13% menjawab tidak setuju.

Nilai indeks untuk peningkatan ketahanan pangan di daerah adalah 2,88 dengan kategori baik. Data dari kuesioner tersebut 87 orang menyatakan setuju dan 13 orang menyatakan tidak setuju, dan hal ini didukung oleh hasil dari wawancara. Dari 7 orang yang diwawancarai, 4 orang menyatakan setuju jika ketahanan pangan meningkat dan 3 orang menyatakan tidak setuju. Hasil wawancaranya sebagai berikut:

Bapak Ramadi (40 tahun, Pedagang) beliau mengatakan bahwa:

“Ketahanan pangan ya biasa saja mbak, stabil. Untuk pangan nggak ada krisis yang sampai gimana-gimana ya tetap aman saja, soalnya disinikan juga produksi beras sendiri. Ada juga raskin dari pemerintah umumnya untuk yang kurang mampu. Tapi biasanya nggak di pakai juga. Masyarakat memilih produksinya sendiri karena lebih bagus daripada yang di kasih”.

Ibu Sri (37 tahun, pedagang) mengatakan:

“Ketahanan pangan stabil, paling untuk petani kadang namanya musim kan berubah-ubah dan ada kalanya gagal panen. Walaupun begitu tidak pernah sampai ada krisis pangan”.

Ibu Maya (29 tahun, guru) mengatakan:

“Krisis pangan sampai parah itu nggak ada, dikarenakan di desa ya tetap stabil dan aman-aman saja untuk masalah pangan. Tidak ada yang perlu di khawatirkan juga. Semuanya masih bisa berjalan dengan baik.

Ibu Ratna (42 tahun, PNS) mengatakan:

“Ketahanan pangan stabil ya standarlah nggak ada kekurangan atau gimana, kami di desa ya tetap bisa makan. Tidak pernah ada krisis yang sampai kekurangan bahan pokok”.

Sedangkan untuk masyarakat yang tidak setuju jika ketahanan pangan meningkat adalah sebagai berikut:

Ibu Rosida (42 tahun, Petani) beliau mengatakan bahwa:

“Ketahanan pangan menurut saya sama saja mbak, gini-gini aja, nggak ada perubahan signifikan. Cara pikir sederhananya gini ‘kalau nggak cari uang sendiri juga nggak ada yang kasih’. Paling susah waktu gagal panen itu yang saya rasakan. Kalau yang lain saya nggak tau. Kalau bantuan dari pemerintah ada raskin, tapi banyak yang nggak dipakai paling dijual lagi, soalnya masih bagus hasil panen sendiri”.

Bapak Sunarto (52 tahun, buruh tani) mengatakan:

“Untuk pangan itu susah ketika musim kemarau dikarenakan tidak ada air untuk mengalir sawah. Jadi kalau musim kemarau akan cenderung gagal panen karena kekeringan. Tidak hanya itu saja saat musim hujan juga akan gagal panen juga karena sawah terendam banjir yang cukup lama”.

Bapak Rian (30 tahun, petani) mengatakan:

“Kalau masalah ketahanan pangan untuk pribadi saya sendiri terkadang tidak stabil. Ya namanya bertani pasti adakalanya gagal. Kalau gagal panen karena yang dihasilkan hanya sedikit tentunya mempengaruhi perekonomian keluarga saya, hasil pertanian di pasaran berkurang dan perekonomian saya menurun juga. Itu biasa terjadi kalau musim hujan dan kemarau panjang”.

Jika melihat hasil dari wawancara tersebut terdapat 2 kategori pendapat, yang menyatakan setuju jika ketahanan pangan meningkat adalah masyarakat yang selain petani dan buruh tani yaitu pedagang, guru dan PNS. Sedangkan yang menyatakan tidak setuju jika meningkat adalah para petani dan buruh tani. Perbedaan persepsi ini didasarkan dari pengalaman pribadi mereka dan juga melihat lingkungan sekitarnya.

Ketahanan pangan di Kecamatan Kretek khususnya dapat dikatakan stabil namun untuk beberapa saat tidak stabil. Hal ini seperti yang dikatakan oleh para petani dan buruh tani jika mereka akan mengalami gagal panen ketika kemarau panjang dan musim penghujan karena lahan mereka digenangi air sehingga hasil panen akan membusuk.

Untuk pemerintah daerah sendiri belum ada upaya untuk memberikan solusi terkait masalah petani ini. Seperti jika musim kemarau untuk mencegah agar sawah tidak kekeringan yaitu dengan membantu membangun saluran air seperti irigasi sehingga saat kekeringan melanda sawah akan tetap basah dan tidak akan terjadi gagal panen. Bagaimanapun jika terjadi gagal panen akan membuat perekonomian terganggu, tidak hanya bagi keluarga yang perekonomiannya menurun namun berdampak



pula untuk daerah karena perekonomian tidak stabil dan menurunkan angka pendapatan perkapita.

Sasaran meningkatnya ketahanan pangan daerah merupakan pelaksanaan dari Misi 3 “Meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui peningkatan kualitas pertumbuhan ekonomi, pemerataan pendapatan berbasis pengembangan ekonomi lokal dan pemberdayaan masyarakat yang *responsive gender*”.

Tabel 3.18

Realisasi Capaian Meningkatnya Ketahanan Pangan Daerah 2012-2015

No	Indikator Kinerja Utama	2012	2013	2014	2015
1	Tingkat ketersediaan energi	125,86 %	134,09 %	139,28%	142,88 %
2	Tingkat ketersediaan protein	116,68 %	128,88 %	133,88%	136,49 %

Sumber: Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Bantul (2015)

#### a) Tingkat Ketersediaan Energi

Tingkat ketersediaan energi menunjukkan keberhasilan dimana pada tahun 2015 capaian kinerjanya telah masuk dalam kriteria sangat tinggi. Dari target 140,91% realisasi tahun 2015 menunjukkan bahwa tingkat ketersediaan energi telah mencapai 142,88%. Jika dibandingkan dengan tahun 2014 telah terjadi peningkatan ketersediaan energi sebesar 3,6%. Dengan angka kecukupan energi sebesar 3.070 Kkal/Kap/hr maka capaian ini sudah di atas standar

Nasional (2.200 Kkal/ Kap/ hr) (Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Bantul, 2015).

b) Tingkat Ketersediaan Protein

Tingkat ketersediaan protein menunjukkan keberhasilan dimana pada tahun 2015 capaian kinerjanya mencapai 136,49%. Capaian di tahun 2015 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yaitu 133,88%. Capaian tersebut masuk dalam kriteria kinerja sangat tinggi, namun hasil yang didapatkan tidak berbeda jauh jika dibandingkan dengan target yang ingin dicapai yaitu 136,21%. Angka kecukupan protein sebesar 77,80 Gr/Kap/ hr maka capaian di atas standar Nasional (57 Gr/ Kap/ hr) (Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Bantul, 2015)

Apabila melihat hasil dari ketersediaan energi dan protein di Kabupaten Bantul, hasilnya sudah lebih dari cukup. Namun walaupun demikian masih adanya masyarakat yang susah pada saat tertentu pastinya tidak dapat diabaikan oleh pemerintah daerah. Jika tidak ada masyarakat yang mengeluhkan terkait ketahanan pangan, tentunya perekonomian akan lebih stabil.

Tabel 3.19

Penilaian Responden terhadap peningkatan kuantitas sarana dan prasarana pendukung ekonomi pada masa Sri Surya Widati tahun 2010-2015

No	Jawaban	Frekuensi	Presentase
1	Sangat Setuju	1	1%
2	Setuju	82	82%
3	Tidak Setuju	15	15%
4	Sangat Tidak Setuju	2	2%
	Jumlah	100	100%

Sumber: Hasil Kuesioner 12

Berdasarkan tabel 3.19 penilaian responden terhadap peningkatan kuantitas sarana dan prasarana pendukung ekonomi pada masa Bupati Bantul tahun 2010-2015 adalah 1 responden dengan presentase 1% menjawab sangat setuju, kemudian 82 responden dengan presentase 82% menjawab setuju, 15 responden dengan presentase 15% menjawab tidak setuju, dan 2 responden dengan presentase 2% menjawab sangat tidak setuju.

Hasil dari jawaban 100 responden, nilai indeks terkait kuantitas sarana dan prasarana pendukung ekonomi adalah 2,82 dengan kategori baik. Kuantitas sarana dan prasarana ekonomi berkaitan dengan jumlah atau wujud nyata dari jalan, jembatan dan pasar sesuai dengan Misi ke-3 dari Bupati.

Data dari kuesioner juga didukung oleh hasil dari wawancara dengan beberapa masyarakat. Dari 5 orang yang diwawancarai, 3 orang menyatakan setuju dan 2 orang menyatakan tidak setuju. Hasil wawancaranya sebagai berikut:

Bapak Sunarto (52 tahun, buruh tani) baliau mengatakan:

“Akses jalan ya ada mbak, sampai ke pelosok pun ada jalannya. Tapi ada beberapa yang seadanya tapi nggak parah juga, yang pentingkan kalo hujan tidak licin dan tidak menggulung juga tanahnya. Kalaupun ada yang masih rusak ya sebagian. Kalo berbicara kuantitas kan bentuk wujudnya ya ada, kalo masalah ada tetapi tidak bagus itu kan udah lain ceritanya, itu masuk kualitas dari sarana dan prasarananya. Sedangkan pasar ada, tapi ada yang belum jadi juga, nggak tau kapan itu selesainya”.

Bapak Ramadi (40 tahun, pedagang) mengatakan:

“Terkait kuantitas dari jalan, jembatan dan pasar ada semuanya. pasar itu tiap tahun membangun, kalau untuk yang di Kecamatan Kretek dari tahun kemarin hingga sekarang belum selesai. Mungkin baru tahap penyelesaian”.

Ibu Mujiati (56 tahun, ibu rumah tangga) mengatakan:

“Kalau menurut saya semuanya ada mbak, jalan ya sampai ke pinggiran sudah bagus, jembatan juga ada, pasar ada juga. Pasar yang lama ada tetapi itu lagi ada pembangunan pasar juga. Tetapi kurang paham itu dari masa ibu Idam atau pak Harsono soalnya seingat saya sudah lama dan belum jadi sampai sekarang”

Sedangkan untuk masyarakat yang menyatakan tidak setuju jika ada ada peningkatan sarana dan prasarana ekonomi sebagai berikut:

Bapak Rian (30 tahun, petani) mengatakan:

“Menurut saya kurang mbak, kalau untuk masalah jalan jembatan saya rasa sudah cukup. Tetapi kalau masalah pasar masih kurang, karena program dari Bupati dari masanya pak Idham hingga bu Idha itu membangun pasar. Tetapi pasar yang dibangun di sini sampai sekarang belum selesai”.

Ibu Maya (29 tahun, guru) mengatakan:

“terkait dengan jalan dan jembatan saya rasa ya lumayan. Tetapi kalau untuk pasar, ya masih kurang. Itu yang ada pasar lama. Untuk yang baru dibangun belum selesai hingga ganti periode kepemimpinan”.

Persepsi masyarakat dipengaruhi oleh faktor pengalaman dan faktor lingkungannya. Jika melihat hasil dari wawancara dengan beberapa warga, untuk kuantitas sarana dan prasarana ekonomi seperti yang ada dalam Misi ke 3 seperti jalan dan jembatan sudah cukup baik. Namun untuk masalah pasar mereka kurang setuju jika pasar mengalami peningkatan kuantitas, karena hingga berganti periode pembangunan belum juga terselesaikan. Salah satu masyarakat mengatakan bahwa program dari Pemda Bantul memang untuk membangun pasar, namun dalam pembangunannya terkadang terjadi kendala yang kemudian lama untuk terselesaikan.

Tabel 3.20

Penilaian Responden terhadap peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendukung ekonomi pada masa Sri Surya Widati tahun 2010-2015

No	Jawaban	Frekuensi	Presentase
1	Sangat Setuju	2	2%
2	Setuju	75	75%
3	Tidak Setuju	20	20%
4	Sangat Tidak Setuju	3	3%
	Jumlah	100	100%

Sumber: Hasil Kuesioner 13

Berdasarkan tabel 3.20 penilaian responden terhadap peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendukung ekonomi pada masa Bupati Bantul tahun 2010-2015 adalah 2 responden dengan presentase 2% memberi jawaban sangat setuju, kemudian 75 responden dengan presentase 75% memberikan jawaban setuju, 20 responden dengan presentase 20%

memberikan jawaban tidak setuju, dan 3 responden dengan presentase 3% memberikan jawaban sangat tidak setuju.

Jika mengacu dari Misi Bupati Bantul tahun 2010 – 2015 sarana dan prasarana yang dimaksud adalah jembatan, jalan, dan pasar. Hasil dari jawaban 100 responden nilai indeks terkait kualitas sarana dan prasarana pendukung ekonomi adalah 2,76 dalam kategori baik.

Data dari kuesioner didukung oleh hasil dari wawancara dengan beberapa masyarakat. Dari 5 orang yang diwawancarai hasil wawancaranya sebagai berikut:

Bapak Rian (30 tahun, petani) beliau berpendapat bahwa:

“Terkait jalan dan jembatan bagus. Paling kalau ada rusak setiap mau lebaran ada perbaikan jalan. Kalau pasar ada pembangunan tapi belum selesai sampai sekarang, karena selalu ada pembangunan saya juga kurang paham itu dari masa Ibu Idha atau masa Pak Harsono”.

Ibu Mujiati (56 tahun, Ibu Rumah Tangga) beliau mengatakan bahwa:

“Akses jalan dan jembatan bagus, tidak ada jalan yang sampai rusak parah. Selain itu juga ada pembangunan jembatan yang menuju ke Mangrove di Desa Tirtohargo. Untuk pasar ya ada pasar yang lama. Kalau yang baru belum selesai jadi belum atu kualitasnya.

Bapak Ramadi (40 tahun, pedagang) beliau mengatakan:

“Untuk jalan semenjak gempa yang dulu itu jalanan selalu bagus, kalau ada yang rusak langsung diperbaiki. Jadi jalan juga merupakan prioritas yang diutamakan kualitasnya. Terkait pasar, pasar itu sering dibangun, jadi kalo selesai disatu tempat berpindah ke tempat yang lain lagi. Jadi masih ada yang belum selesai pembangunannya, sekarang masih dilanjutkan walaupun sudah berganti kepemimpinan”.

Bapak Sunarto, (52 tahun, Buruh Tani):

“Pembangunan jalan pasti ada mbak, tetapi hasilnya kadang bikin orang bingung. Seperti jalan yang mbak lewati tadi ada jalan yang bagus kemudian berlubang lalu bagus lagi dan berlubang lagi. Jadi itu dari pihak yang membangun memang kayak gitu atau dari atas yang minta dibangun begitu. Itu karena dananya kurang atau gimana saya juga kurang paham. Terkait jembatan, disini tidak banyak jembatan dan kualitasnya standar ya lumayan dan layak pada umumnya. Sedangkan terkait pasar, itu ada dan kualitas bangunannya juga bagus yang sudah jadi, karena masih ada beberapa yang belum jadi.

Ibu Maya (29 tahun, guru) mengatakan:

“Terkait dengan jalan dan jembatan kualitasnya cukup bagus. Walaupun terkadang ada yang rusak tetapi tidak parah. Tetapi kalau untuk pasar, ya masih kurang. Kalau pasar yang lama ya begitu kualitasnya, tetapi kalau pasar yang baru karena belum jadi ya belum tau bagaimana kualitasnya”.

Jika melihat hasil dari wawancara dengan 5 orang masyarakat diketahui bahwa kualitas dari sarana dan prasarana pendukung ekonomi seperti jalan dan jembatan cukup baik. Namun untuk pasar kualitasnya belum dapat ditentukan karena belum selesai pembangunannya walaupun sudah berganti kepemimpinan. Tentunya akan sulit bagi masyarakat untuk mengatakan baik atau buruk jika belum melihat langsung bagaimana hasilnya. Sedangkan untuk kualitas dari pasar yang lama kualitasnya masih kurang, karena tempatnya yang kecil dan sempit. Persepsi yang diberikan masyarakat dipengaruhi oleh faktor lingkungan dan faktor pengetahuan.

Tabel 3.21

Penilaian Responden terhadap penurunan tingkat pengangguran pada masa Sri Surya Widati tahun 2010-2015

No	Jawaban	Frekuensi	Presentase
1	Sangat Setuju	1	1%
2	Setuju	20	20%
3	Tidak Setuju	77	77%
4	Sangat Tidak Setuju	2	2%
	Jumlah	100	100%

Sumber: Hasil Kuesioner 14

Berdasarkan tabel 3.21 penilaian responden terhadap penurunan tingkat pengangguran pada masa Bupati Bantul tahun 2010-2015 adalah 1 responden dengan presentase 1% menjawab sangat setuju, kemudian 20 responden dengan presentase 20% menjawab setuju, sedangkan 77 responden dengan presentase 77% menjawab tidak setuju, dan 2 responden dengan presentase 2% menjawab sangat tidak setuju.

Nilai indeks untuk penurunan tingkat pengangguran adalah 2,20 dengan kategori kurang baik. Data dari kuesioner tersebut didukung oleh hasil dari wawancara dengan beberapa masyarakat. Dari 7 orang yang diwawancarai, 2 orang menyatakan setuju jika tingkat pengangguran mengalami penurunan dan 5 orang lainnya menyatakan tidak setuju.

Bapak Tri (57 tahun, PNS) beliau mengatakan bahwa:

“Menurut saya angka pengangguran menurun, karena setelah selesai dari perguruan tinggi mereka akan mampu untuk bersaing dalam dunia kerja. Selain pengetahuan yang dimiliki, juga memiliki keterampilan”.



Ibu Maya (29 tahun, Guru) mengatakan bahwa:

“Semakin baiknya kualitas pendidikan tentunya akan berpengaruh dan mampu untuk dapat memasuki dunia kerja bagi lulusan sekolah menengah maupun perguruan tinggi”.

Sedangkan masyarakat yang tidak setuju jika pengangguran mengalami penurunan, hasil wawancaranya sebagai berikut:

Bapak Ramadi (40 tahun, Pedagang) mengatakan bahwa:

“Jumlah pengangguran sama saja, tidak ada penurunan. Tetapi malah cenderung naik. Semakin banyak lulusan SLTA maupun perguruan tinggi tapi tidak ada perluasan lapangan kerja dari pemerintah, jadi ya semakin menumpuk jumlah penganggurannya”.

Ibu Tatik (32 tahun, Ibu rumah tangga) berpendapat bahwa:

“Setiap tahun pengangguran semakin banyak, selain karena kurangnya lapangan pekerjaan yang ada juga karena ketidakmampuan untuk bersaing sehingga kalah dengan yang memiliki *skill*”.

Bapak Rian (30 tahun, petani) mengatakan:

“Pengangguran semakin banyak bahkan tidak ada upaya dari pemerintah daerah untuk membantu masyarakat dengan cara membuka lapangan pekerjaan. Selama 5 tahun menjabat saya melihat sama aja, tidak ada perkembangan ke arah yang lebih baik. Pengangguran malah semakin melimpah”

Ibu Mujiati (56 tahun, ibu rumah tangga) mengatakan:

“Baik lulusan sekolah menengah maupun perguruan tinggi masih susah untuk mendapatkan pekerjaan karena masih kurangnya lapangan pekerjaan yang tersedia”.

Ibu Rosida (42 tahun, petani) mengatakan:

“Kalau saya lihat tidak menurun malah tambah banyak yang menganggur, baik lulusan sekolah menengah maupun dari perguruan tinggi”.

Persepsi yang diberikan masyarakat dipengaruhi oleh faktor lingkungan, pengalaman, dan pengetahuan. Jika melihat hasil dari wawancara di atas dapat diketahui bahwa angka pengangguran tidak mengalami penurunan, baik itu lulusan sekolah menengah maupun dari perguruan tinggi. Banyaknya angka pengangguran disebabkan karena kurangnya lapangan pekerjaan yang disediakan oleh pemerintah daerah, lulusan sekolah maupun perguruan tinggi setiap tahun mengalami peningkatan namun hal itu tidak diikuti dengan perluasan lapangan pekerjaan sehingga penumpukan pengangguran pun terjadi.

Apabila pemerintah tidak mampu membuka lapangan pekerjaan setidaknya membuat sebuah pelatihan agar masyarakat yang masih produktif untuk bekerja mampu membuka lapangan pekerjaan sendiri jika dibekali oleh keterampilan. Seperti membuat kerajinan untuk di Kecamatan Kretek itu masih kurang, sehingga masih ada peluang jika mampu untuk menggeluti pekerjaan tersebut.

Selain itu juga seharusnya ada kemudahan akses pendidikan bagi masyarakat yang kurang mampu namun berprestasi sehingga dapat melanjutkan ke perguruan tinggi, karena pasti ada masyarakat yang berprestasi di sekolah namun tidak mampu untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi karena kendala dan keterbatasan ekonomi. Hal-hal seperti ini perlu diperhatikan oleh pemerintah daerah, selain meningkatkan kualitas dari pendidikan juga mampu mensejahterakan masyarakat.

Di luar dari alasan di atas, tingkat pengangguran yang terus meningkat selain disebabkan oleh dampak berkepanjangan krisis ekonomi dan bencana alam juga disebabkan oleh rendahnya kualitas angkatan kerja yang mampu bersaing dan tidak mampu menciptakan lapangan kerja mandiri. Peluang usaha pada prinsipnya masih lebar, dibutuhkan kemampuan dan fasilitas untuk dapat merealisasikannya. Lapangan kerja yang akan terus bertahan adalah yang memiliki pangsa pasar yang besar dan memiliki daya saing produk, maka penerapan iptek dalam produksi dan bisnis serta peningkatan hubungan antara produsen lokal dengan pasar yang luas harus menjadi perhatian (Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Bantul, 2015).

Jika melihat pernyataan yang terdapat dalam LKJ Pemerintah Bantul, Pemda sudah mengetahui kendala dan solusi yang seharusnya diambil untuk mengatasi pengangguran namun tidak adanya tindakan lebih lanjut, sehingga program penurunan pengangguran hanya semacam wacana yang tidak akan pernah terwujud hasilnya, karena dari pihak pemerintah daerah tidak mau untuk menjalankan programnya. Hal ini dibuktikan dengan selama 5 tahun menjabat Bupati belum mampu untuk mengurangi pengangguran dan membuka lapangan pekerjaan, walaupun sudah memiliki solusi untuk mengatasinya. Sehingga setiap tahunnya pengangguran bukan mengalami penurunan tetapi sebaliknya mengalami kenaikan.

Di bawah ini adalah tabel tentang jumlah pengangguran berdasarkan jenjang pendidikan di Bantul dari tahun 2011-2015:

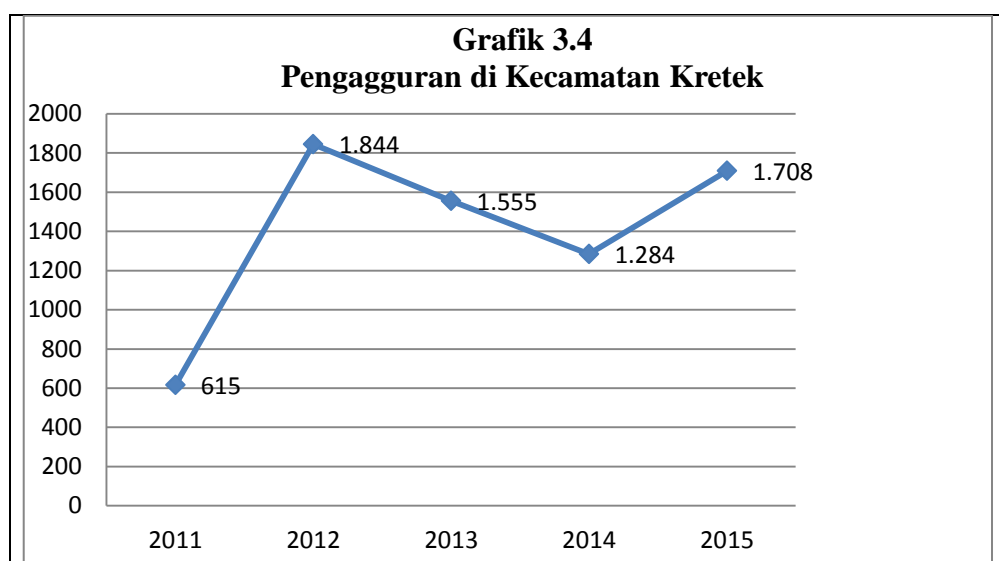
Tabel 3.22

**Jumlah Pengangguran Berdasarkan Pendidikan  
di Kabupaten Bantul Tahun 2011 – 2015**

No	Pendidikan	2011	2012	2013	2014	2015
1	Tidak tamat SD	6.273	4.651	4.777	3.924	3.958
2	SD	6.486	6.316	5.309	4.800	4.491
3	SLTP	6.499	6.734	5.692	5.551	5.175
4	SLTA	6.485	6.670	5.571	5.750	6.114
5	Akademi	1.987	2.117	2.771	1.494	1.575
6	S1-S3	1.489	1.587	2.068	997	1.240
<b>Jumlah</b>		<b>29.219</b>	<b>28.075</b>	<b>26.188</b>	<b>22.516</b>	<b>22.553</b>

Sumber: Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Bantul (2015)

Berdasarkan tabel 3.22 yang menjadi pengangguran tidak hanya yang berpendidikan SLTA ke bawah namun Akademi dan S1-S3 juga mengalami hal yang sama, bahkan setiap tahunnya mengalami dinamika naik dan turun. Meskipun mengalami naik dan turun, tetap saja sampai tahun 2015 angka pengangguran di Kabupaten Bantul tetap tinggi. Sementara itu, angka pengangguran di Kecamatan Kretek dapat dilihat pada grafik di bawah ini:



Sumber: Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Bantul (2015)

Angka pengangguran di Kecamatan Kretek juga tidak mengalami perbedaan dengan yang terjadi di tingkat kabupaten. Angka pengangguran di Kecamatan Kretek hingga tahun 2015 masih cukup tinggi. Jika dilihat dari Grafik 3.4 pada tahun 2011 jumlah pengangguran berjumlah 615 orang namun pada tahun 2012 mengalami peningkatan yang tajam menjadi 1.844 orang. Pada tahun 2013 mengalami penurunan menjadi 1.555 orang dan turun lagi di tahun 2014 menjadi 1.284 orang. Tetapi di tahun 2015 kembali naik menjadi 1.708 orang.

Berdasarkan grafik 3.4 di atas sejalan dengan apa yang dikatakan oleh masyarakat, jika pengangguran di Kecamatan Kretek tidak mengalami penurunan namun terjadi dinamika setiap tahunnya yaitu adakalanya turun namun ditahun berikutnya mengalami kenaikan. Apabila tidak segera di atasi maka tidak menutup kemungkinan akan terjadinya kenaikan angka pengangguran walaupun sekarang sudah berganti kepemimpinan, namun jika pemimpin yang baru juga tidak cepat tanggap dengan apa yang ada di masyarakat maka kenaikan jumlah pengangguran akan benar-benar terjadi.

Tabel 3.23

Penilaian Responden terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin pada masa Sri Surya Widati tahun 2010-2015

No	Jawaban	Frekuensi	Presentase
1	Sangat Setuju	3	3%
2	Setuju	70	70%
3	Tidak Setuju	25	25%
4	Sangat Tidak Setuju	2	2%
	Jumlah	100	100%

Sumber: Hasil Kuesioner 15

Berdasarkan tabel 3.23 penilaian responden terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin pada masa Bupati Bantul tahun 2010-2015 adalah 3 responden dengan presentase 3% menjawab sangat setuju, kemudian 70 responden dengan presentase 70% menjawab setuju, sedangkan 25 responden dengan presentase 25% menjawab tidak setuju, dan 2 responden dengan presentase 2% menjawab sangat tidak setuju.

Nilai indeks untuk kesejahteraan masyarakat yang meningkat adalah 2,74 dengan kategori baik. Data dari kuesioner tersebut didukung oleh hasil wawancara dengan beberapa masyarakat. Dari 5 orang yang diwawancarai, 3 orang menyatakan setuju jika mengalami kenaikan namun 2 orang lainnya tidak setuju. Hasil wawancaranya sebagai berikut:

Bapak Ramadi (40 tahun, Pedagang) beliau mengatakan bahwa:

“Dilihat dari segi ekonominya ya menurut saya sekarang semakin sejahtera. Contohnya saja kalau dulu masih pakai sepeda ontel sekarang sudah pakai sepeda motor, bisa memperbaiki rumah. Ya walaupun itu sebenarnya hasil dari jerih payahnya sendiri tidak ada bantuan dari pemerintah. Orang kecilkan kalau nggak cari sendiri nggak akan dapat apa-apa. Istilahnya “ora obah ora mamah” maksudnya kalau nggak gerak dan usaha sendiri nggak bakalan bisa makan, karena nggak ada yang bisa diharapkan kecuali diri sendiri”.

Bapak Rian (30 tahun, petani) mengatakan:

“Sebagai rakyat kecil ya sejahtera-sejahtera saja, yang penting hasil pertanian nggak gagal. Kalau pun gagal waktu musim hujan karena banjir. Kalau bantuan dari pemerintah itu ada subsidi pupuk untuk pertanian ya meringankan beban kita, yang harusnya bayar banyak jadi bayarnya nggak terlalu memberatkan. Kalau untuk daerah sini, susah-susah nggak ada yang sampai nggak bisa makan, ya perekonomiannya kalangan bawah tapi nggak sampai yang parah, karena kan juga bekerja walaupun hanya buruh serabutan”.

Ibu Maya (29 tahun, guru)

“Menurut saya semakin sejahtera mbak, karena saya mengukurnya dari kualitas tingkat pendidikan, kualitas kesehatan yang semakin baik, selain itu pangan juga tercukupi. Ya sejahtera-sejahtera saja”.

Sedangkan masyarakat yang tidak setuju jika kesejahteraan masyarakat meningkat, berikut hasil wawancaranya:

Ibu Rosida (42 tahun, petani)

Biasa saja mbak, kalau saya gagal panen juga tidak ada yang membantu. Kalau perekonomian keluarga saya tidak stabil juga saya sendiri yang menanggung. Ya maksudnya masyarakat sendiri yang bertanggungjawab untuk hidupnya sendiri. Saya rasa siapapun yang menjawab nasib masyarakat ya gini-gini saja.

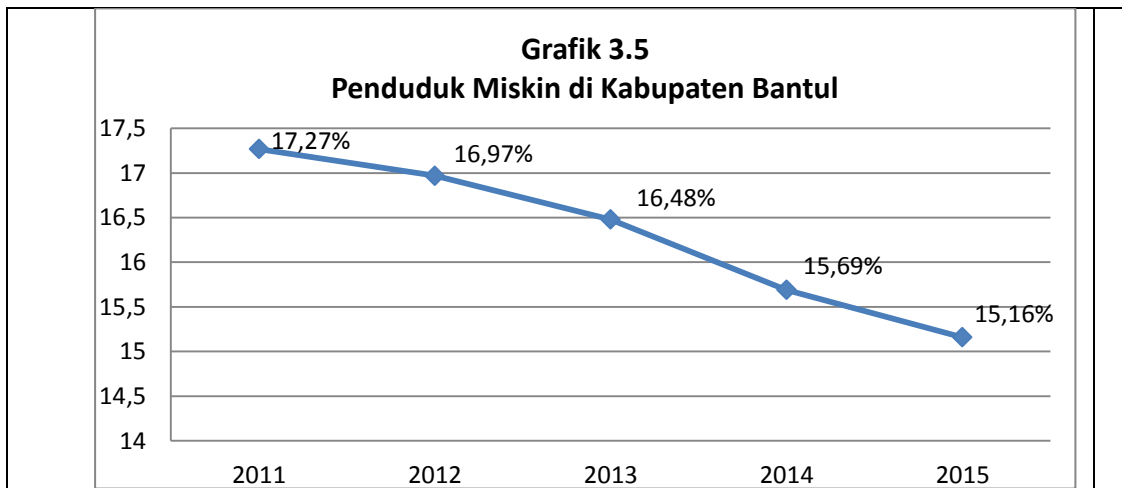
Ibu Tatik (32 tahun, ibu rumah tangga)

“Sama saja mbak, tidak ada meningkat kalau saya lihat dan saya rasakan. Dari dulu ya seperti, kan juga cari makan sendiri-sendiri. Mau siapapun yang menjabat nggak ada dampak yang signifikan untuk kesejahteraan masyarakat”.

Hasil dari wawancara tersebut persepsi masyarakat berbeda-beda terkait tingkat kesejahteraan yang meningkat. Sudah dijelaskan pula pada pembahasan-pembahasan sebelumnya jika persepsi seseorang dipengaruhi oleh faktor pribadi, lingkungan maupun keluarga, baik itu dirasakannya langsung ataupun hasil dari melihat dan mendengar.

Masyarakat yang merasa kesejahteraannya tidak meningkat karena dari masa ke masa keadaan perekonomiannya tidak mengalami perubahan yang signifikan. Sedangkan dilain pihak ada yang mengatakan sejahtera karena diukur dari kualitas tingkat pendidikan yang semakin membaik, kualitas kesehatan yang terus berkembang dan mendapatkan pekerjaan yang sesuai. Namun untuk yang tidak merasakan hal tersebut tentunya tidak akan

merasa sejahtera karena tidak ada perubahan yang cukup terlihat. Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Bantul dapat dilihat pada grafik 3.5 di bawah ini:



Sumber: Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Bantul (2015)

Jika melihat Grafik 3.5 jumlah penduduk Miskin di Kabupaten Bantul mengalami penurunan setiap tahunnya. Pada tahun 2011 berjumlah 17,27% kemudian di tahun 2012 turun menjadi 16,97%. Di tahun 2013 kembali turun menjadi 16,48%. Untuk di tahun 2014 turun menjadi 15,69% dan tahun 2015 menjadi 15,16%.

Walaupun masih ada masyarakat yang tidak setuju jika kesejahteraan meningkat bisa saja masyarakat tersebut termasuk dalam 15% orang yang perekonomiannya menengah ke bawah, sehingga perlunya kerja keras dari Pemda agar mampu untuk menekan angka kemiskinan. Tetapi kinerja dalam menurunkan angka kemiskinan juga sudah lumayan walaupun perlu ditingkatkan lagi, sehingga kesejahteraan dari setiap lapisan masyarakat dapat tercapai.



Jika berdasarkan Grafik 3.5 hasilnya sangat bagus karena kesejahteraan masyarakat mengalami peningkatan. Seorang Kepala Daerah harus mampu membuat masyarakatnya sejahtera dan mengentaskan dari kemiskinan. Walaupun angka kemiskinan menurun namun masih banyak pula masyarakat yang kurang mampu. Ini disebabkan karena kurang optimalnya sinergitas program penanggulangan kemiskinan, masih rendahnya kemampuan masyarakat dalam mengembangkan potensinya untuk meningkatkan pendapatan dan mengatasi masalah kemiskinannya, serta kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana produksi usaha ekonomi masyarakat miskin yang kurang memadai.

Kesejahteraan masyarakat merupakan tujuan utama dalam sebuah pembangunan, baik itu pembangunan di pusat maupun daerah. Dalam setiap implementasi kebijakan pemerintah selalu menjadikan kesejahteraan sebagai tujuan yang akan dicapai. Melalui desentralisasi, setiap daerah diberikan keleluasaan untuk membangun dan mengatur pembangunan daerahnya sendiri, selain itu juga lebih mendekatkan kesejahteraan kepada masyarakatnya.

Hal yang perlu dilakukan untuk melaksanakan percepatan pembangunan yaitu dengan merancang skala prioritas terhadap aspek-aspek pembangunan daerah. Percepatan juga diarahkan sektor ekonomi unggulan, dengan demikian akan menciptakan lapangan kerja dan mengurangi penduduk miskin serta jumlah pengangguran.

Pembangunan yang berhasil berorientasi pada kepentingan dari masyarakat. Masyarakat di daerah harus diposisikan sebagai subjek juga sebagai pihak yang mendapatkan manfaat dari setiap program dan kegiatan yang akan dilaksanakan, sehingga program pembangunan diarahkan untuk kegiatan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan praktis dan strategis yang hasil serta dampaknya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Selain itu, kebutuhan dari masyarakat terpenuhi dan juga adanya pelibatan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan, pelaksanaan hingga pengawasan, sehingga mampu memberdayakan masyarakat Bantul itu sendiri.

Tidak hanya itu saja, pembangunan daerah juga harus berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. Hal ini berguna untuk mempertimbangkan dampak terhadap kondisi lingkungan, ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat di daerah dalam jangka pendek, menengah, dan jangka panjang. Serta dalam pelaksanaannya tidak boleh diskriminatif, karena setiap pembangunan harus merata dan tersebar keseluruh wilayah, dari kota hingga ke desa-desa.

Tabel 3.24

Penilaian Responden terhadap peningkatan jumlah sarana dan prasarana publik pada masa Sri Surya Widati tahun 2010-2015

No	Jawaban	Frekuensi	Presentase
1	Sangat Setuju	1	1%
2	Setuju	85	85%
3	Tidak Setuju	14	14%
4	Sangat Tidak Setuju	-	-
	Jumlah	100	100%

Sumber: Hasil Kuesioner 16

Berdasarkan tabel 3.24 penilaian responden terhadap peningkatan jumlah sarana dan prasarana publik pada masa Bupati Bantul tahun 2010-2015 adalah 1 responden dengan presentase 1% berpendapat sangat setuju, 85 responden dengan presentase 85% berpendapat setuju, kemudian 14 responden dengan presentase 14% berpendapat tidak setuju.

Jumlah sarana dan prasarana publik yang dimaksud adalah sesuai dengan Misi ke-4 terkait memantapkan program penanggulangan bencana. Data hasil kuesioner di atas di dukung oleh hasil dari wawancara dengan beberapa masyarakat. Nilai indeks untuk jumlah sarana dan prasarana publik yang meningkat adalah 2,87 dengan kategori baik. Dari 5 orang yang diwawancarai 4 orang menyatakan setuju jika jumlah sarana dan prasarana publik terkait penanggulangan bencana meningkat, dan 1 orang menyatakan tidak setuju. Hasil dari wawancaranya sebagai berikut:

Bapak Ramadi (40 tahun, Pedagang) beliau mengatakan bahwa:

“Untuk penanggulangan bencana ada kantor SAR (*Search And Rescue*) yang akan membantu masyarakat ketika terjadi bencana. Mereka cepat tanggap dalam hal penanganan. Di Bantul ini kan rawan angin puting beliung, jadi ketika ada bencana angin pasti ada pohon

yang tumbang kemudian listrik padam, itu mereka langsung memperbaikinya dan membersihkan pohon-pohon akibat angin tersebut. Tetapi kalau penanganan gempa itu yang saya rasa sulit, mereka (tim SAR) kalau terjadi gempa pasti bingung bagaimana mau menyelamatkan dirinya sendiri. Terkait post kalau terjadi bencana itu tidak ada”.

Ibu Sri (58 tahun, pedagang) mengatakan:

“Sarana dan prasarana publik terkait bencana sudah adanya desa tangguh bencana dan sekolah siaga bencana yang ada di Parangtritis. Desa tangguh bencana itu digunakan untuk melatih masyarakat agar tidak panik saat terjadi bencana, mengingat di Kecamatan Kretek juga sering terjadi bencana”.

Bapak Sunarto (52 tahun, buruh tani) mengatakan:

“Sarana dan prasarana untuk penanggulangan bencana itu ada tim SAR yang ditugaskan untuk mengevakuasi dan membantu masyarakat kalau ada bencana”

Ibu Tatik (32 tahun, ibu rumah tangga) mengatakan:

“Masyarakat di bantu dengan akses dari tim SAR kalau ada bencana seperti angin puting beliung yang sering terjadi di Bantul, mereka sangat cepat tanggap. Kalau ada kebakaran juga ada pemadam kebakaran yang siap dan langsung membantu”.

Sedangkan masyarakat yang tidak setuju jika sarana dan prasarana penanggulangan bencana meningkat adalah:

Ibu Rosida (42 tahun , petani) mengatakan:

“Untuk desa tangguh bencana belum merata pembentukannya. Bencana kan tidak hanya terjadi di satu lokasi, lokasi sekitarnya pasti juga terkena dampaknya. Itu yang perlu ditingkatkan menurut saya”.

Persepsi yang diberikan masyarakat dipengaruhi oleh pengalaman, lingkungan, dan pengetahuan. Sarana dan prasarana yang disediakan

pemerintah Kabupaten Bantul adalah adanya tim SAR yang selalu membantu masyarakat saat terjadi bencana. Mereka juga cepat tanggap dan langsung ke lapangan dan meninjau langsung untuk melihat dan melakukan evakuasi. Selain itu juga adanya desa tangguh bencana dan sekolah siaga bencana yang digunakan untuk melatih masyarakat agar tidak merasa bingung ketika terjadi bencana. Hal ini tentunya membantu masyarakat agar bisa langsung bertindak dan melakukan apa yang seharusnya dilakukan ketika terjadi bencana. Fungsinya adalah agar meminimalisir jatuhnya korban jika bencana terjadi.

Di Kabupaten Bantul memiliki potensi rawan bencana alam seperti: banjir, tanah longsor, gempa bumi, tsunami, dan kekeringan. Desa tangguh yang terealisasi sampai tahun 2015 sebanyak 13 (tiga belas) desa dari 75 (tujuh puluh lima) desa yang ada di Kabupaten Bantul. Untuk di Kecamatan Kretek desa tangguh bencana berada di Tirtohargo dan desa Parangtritis. Sedangkan untuk sekolah siaga bencana di Kecamatan Kretek ada 2 yaitu, SD Parangtritis dan SMA 1 Kretek.

Upaya dalam merintis desa tangguh bencana dilakukan dengan memperhatikan banyak faktor kesiapan dari masing-masing desa. Hal inilah yang menyebabkan tidak semua desa menjadi desa tangguh bencana. Desa tangguh bencana dibentuk dengan bekerjasama langsung dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Desa tangguh bencana menuntut kesadaran masyarakat tentang perilaku menyelamatkan keluarga saat terjadi bencana. Upaya penanggulangan bencana guna menghindari jatuhnya korban jiwa ataupun kerugian yang lebih besar dilakukan dengan penghijauan di kawasan rawan longsor dan sekitar pantai, pembangunan talud, *drainase*, pembangunan prasarana air bersih, *droping* air, dan sebagainya.

Selain itu, pembangunan berbasis pengurangan risiko bencana mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut (Laporan Kinerja Pemerintah, 2015):

- a. Pada daerah-daerah sesar/wilayah rawan tinggi bencana gempa bumi tidak dibangun untuk pemukiman dan fasilitas umum;
- b. Pada daerah-daerah sesar/wilayah rawan sedang, pemukiman haruslah mempunyai struktur bangunan yang kuat, begitu pula sekolah, puskesmas, tempat ibadah dan toko-toko;
- c. Pada daerah-daerah sesar/wilayah rawan gempa, disiapkan desa tangguh dan sekolah siaga bencana, bahkan kantor siaga bencana;
- d. Untuk kesiapsiagaan penanggulangan bencana, yaitu penambahan dan pemeliharaan sarana prasarana dan peralatan evakuasi, rambu evakuasi, penambahan rambu-rambu bahaya, pengeras suara di sepanjang pantai dan togor EWS serta peningkatan kualitas SDM tenaga penanggulangan bencana.

Desa Tangguh Bencana (Destana) merupakan upaya pengurangan risiko bencana berbasis komunitas untuk melindungi masyarakat dari ancaman bencana. Tujuan khusus pengembangan destana ini adalah:

- a) Melindungi masyarakat di kawasan rawan bencana dari dampak-dampak merugikan bencana
- b) Meningkatkan peran serta masyarakat, khususnya kelompok rentan, dalam pengelolaan sumber daya untuk mengurangi risiko bencana
- c) Meningkatkan kapasitas kelembagaan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya dan pemeliharaan kearifan lokal bagi PRB (Pengurangan Resiko Bencana)
- d) Meningkatkan kapasitas pemerintah dalam memberikan dukungan sumber daya dan teknis bagi PRB
- e) Meningkatkan kerjasama antara para pemangku kepentingan dalam PRB, pihak pemerintah daerah, lembaga usaha, perguruan tinggi, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Organisasi Masyarakat (Ormas), dan kelompok-kelompok lainnya yang peduli.

#### 4. Akuntabilitas

Penilaian masyarakat terkait aspek akuntabilitas adalah sebagai berikut:

Tabel 3.25

Penilaian Responden terhadap kemampuan Sri Surya Widati tahun 2010-2015 untuk mengelola keuangan daerah

No	Jawaban	Frekuensi	Presentase
1	Sangat Setuju	3	3%
2	Setuju	68	68%
3	Tidak Setuju	28	28%
4	Sangat Tidak Setuju	1	1%
	Jumlah	100	100%

Sumber: Hasil Kuesioner 17

Berdasarkan tabel 3.25 dapat diketahui bahwa responden yang berpendapat bahwa Bupati Bantul mampu untuk mengelola keuangan daerah adalah 3 responden dengan presentase 3% berpendapat sangat setuju, kemudian 68 responden dengan presentase 68% menjawab setuju, sedangkan 28 responden dengan presentase 28% menjawab tidak setuju, dan 1 responden dengan presentase 1% menjawab sangat tidak setuju.

Nilai indeks terkait dengan kemampuan Bupati dalam mengelola keuangan daerah adalah 2,73 dengan kategori baik. Data dari kuesioner di atas didukung oleh hasil dari wawancara dengan masyarakat. Dari 5 orang yang diwawancarai, 3 orang menyatakan setuju, dan 2 orang lainnya menyatakan tidak setuju. Hasil wawancaranya sebagai berikut:

Bapak Rian (30 tahun, Petani) beliau mengatakan bahwa:

“Menurut saya Bupati mampu untuk mengelola keuangan daerah. Kalau tidak mampu tidak akan mungkin ada pembangunan di setiap kecamatan, pasti uangnya sudah habis kemana-mana”.



Bapak Ramadi (40 tahun, pedagang) beliau berpendapat:

“Kalau dibilang mampu ya mampu tetapi tidak terlalu. Memang ada pembangunan tetapi tidak ada yang menonjol hasil pembangunannya. Ya biasa-biasa saja. Jadi intinya kalau menurut saya Bupati mampu mengelola tetapi tidak terlalu memuaskan hasil dari pengelolaannya tersebut”.

Ibu Maya (29 tahun, guru) mengatakan:

“Saya kira mampu, karena setiap programnya dijalankan. Pengelolaan keuangan daerah itu kan sebagian besarnya direalisasikan untuk pembangunan. Tidak hanya pembangunan fisik, namun juga sosial, ekonomi dan kesehatan”.

Sedangkan masyarakat yang menyatakan tidak setuju dalam jika Bupati mampu mengelola keuangan daerah adalah sebagai berikut:

Bapak Tri (57 tahun, PNS) mengatakan:

“Saya bilang tidak mampu. karena uang yang harusnya untuk biaya tambahan PNS tidak diberikan berartikan tidak mampu mengelola”.

Bapak Sunarto (52 tahun, buruh tani) mengatakan:

“Kurang mampu karena kalau mampu mengelola keuangan pasti bisa membantu pengurangan angka pengangguran. Bisa diberikan pelatihan dan di fasilitasi, pelatihan didanai oleh Pemda. Tetapi tidak ada sama sekali”.

Ibu Sri (37 tahun, pedagang) mengatakan:

“Saya tidak pernah tau bagaimana cara pengelolaan keuangannya, jadi saya rasa tidak mampu. kalau mampu pasti ada perubahan yang signifikan bagi masyarakat”.

Jika melihat hasil dari wawancara di atas, ada masyarakat yang mengatakan Bupati mampu untuk mengelola keuangan daerah namun ada juga yang mengatakan tidak mampu. Masyarakat yang mengatakan mampu

karena berdasarkan kenaikan kualitas pendidikan, kesehatan dll. Namun yang menyatakan tidak mampu disebabkan karena tidak ada perubahan yang signifikan dalam masyarakat. Jadi kalau melihat dari PAD tentunya mampu untuk mensejahterakan masyarakat tetapi hasilnya tidak kelihatan, itulah yang kemudian masyarakat memberikan persepsi Bupati tidak mampu mengelola keuangan daerah.

Kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan tercermin dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang salah satunya adalah mengukur kinerja pendapatan APBD dilaksanakan dengan mengukur sumber pendapatan. Kepala Daerah merupakan pemegang kekuasaan umum pengelolaan keuangan daerah, karena jabatannya memiliki kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan daerah dan mempunyai kewajiban menyampaikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kewenangannya tersebut kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Kekuasaan umum pengelolaan keuangan daerah meliputi antara lain fungsi penyusunan anggaran, fungsi pemungutan pendapatan, fungsi pembendaharaan umum daerah, fungsi penggunaan anggaran, serta fungsi pengawasan dan pertanggungjawaban.

Kepala Daerah sebagai pejabat pemegang kekuasaan umum menyerahkan sebagian atau keseluruhan kewenangannya kepada Sekretaris Daerah dan atau perangkat pengelola keuangan daerah. Penyerahan dilakukan untuk efektivitas serta efisiensi dalam pengelolaan keuangan daerah.

Seorang Kepala Daerah memiliki peran dalam meningkatkan kemampuan keuangan daerah yaitu dengan memberikan persetujuan dan perizinan penanaman modal serta untuk permohonan penanaman modal dalam rangka modal dalam negeri, membuat Perda bersama DPRD dalam rangka kemudahan investasi di daerahnya, penarikan pajak dan retribusi daerah, kekayaan yang dipisahkan, pinjaman daerah, dan mengeluarkan keputusan daerah yang dapat mendukung terciptanya sistem yang mampu meningkatkan keuangan daerah, serta mengawasi berjalannya roda pemerintahan dalam hal keuangan daerah dimana kepala daerah sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah. Kepala Daerah dalam melaksanakan kekuasaannya melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya yang berupa perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban, serta pengawasan, keuangan daerah kepada para pejabat perangkat daerah.

Tabel 3.26

Penilaian Responden terhadap pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan secara transparan oleh Sri Surya Widati tahun 2010-2015

No	Jawaban	Frekuensi	Presentase
1	Sangat Setuju	2	2%
2	Setuju	43	43%
3	Tidak Setuju	50	50%
4	Sangat Tidak Setuju	5	5%
	Jumlah	100	100%

Sumber: Hasil Kuesioner 18

Dilihat dari tabel 3.26 penilaian masyarakat terhadap pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan secara transparan oleh Bupati Bantul 2010-

2015 adalah 2 responden dengan presentase 2% menjawab sangat setuju, kemudian 43 responden dengan presentase 43% menjawab setuju, sedangkan 50 responden dengan presentase 50% tidak setuju, dan 5 responden dengan presentase 5% sangat tidak setuju.

Nilai indeks terkait pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan secara transparan oleh Bupati adalah 2,64 dengan kategori baik. Data dari kuesioner didukung oleh hasil wawancara dengan beberapa masyarakat. Dari 6 orang yang diwawancarai, 2 orang menyatakan setuju jika transparan dan 4 orang lainnya tidak setuju. Hasil wawancaranya sebagai berikut:

Ibu Rosida (42 tahun, petani) mengatakan:

“Menurut saya transparan, walaupun tidak ke masyarakat tetapi sudah ada yang mengawasi juga. Kalau masyarakat seperti saya ini dikasih tau pun juga akan bingung untuk memahaminya. Jadi saya percayakan saja”.

Ibu Mujiati (56 tahun, ibu rumah tangga) mengatakan:

“Saya rasa sudah transparan, walaupun nanti terjadi apa-apa ada yang mengawasi dari BPK juga dan ada DPRD. Kita percayakan saja sama mereka, lagian saya juga bingung nggak tau gimana cara membukanya walaupun di tunjukan ke masyarakat”

Sedangkan yang tidak setuju jika pengelolaan keuangan dilakukan secara transparan adalah sebagai berikut:

Bapak Ramadi (40 tahun, pedagang) beliau mengatakan:

“Terkait transparansi pengelolaan keuangan daerah itu belum dilakukan. Kalau dilakukan pasti sama seperti yang di terapkan di Kota Surabaya, menggunakan e-budgeting sehingga masyarakat juga dapat melihat dan melakukan pemantauan terhadap dana yang digunakan. Selain itu juga dapat langsung menyampaikan keluhan jika

ada yang mencurigakan terkait datanya. Tetapi sampai saat ini di Bantul belum mampu menerapkan model pengelolaan keuangan seperti itu”.

Ibu Maya (29 tahun, Guru) mengatakan:

“Tidak transparan, kalau transparan pasti masyarakat tau pendapatannya berapa, digunakan untuk apa saja, kan begitu seharusnya kalau transparan”.

Ibu Ratna (42 tahun, PNS) mengatakan:

“Belum transparan, karena setiap PAD dan APBD tiap tahunnya masyarakat tidak tau. Kemudian dana untuk melakukan semua pembangunan masyarakat juga tidak tau menau. Tidak adanya akses untuk ke sana”.

Bapak Tri (57 tahun, PNS) mengatakan:

Tidak transparan, kalau transparan itu kayak yang diterapkan di Kota Surabaya, kemudian di Jakarta dan Bandung. Saya pernah lihat diberita kota-kota itu yang sudah menerapkan *e-budgeting*, jadi masyarakat bisa tau uangnya berapa, program yang dijalankan apa saja dan dananya berapa, jadi akan mencegah penggelapan dana”.

Hasil dari wawancara di atas 2 orang menyatakan setuju jika transparan dan 4 orang menyatakan tidak setuju. Peneliti melihat bahwa jawaban yang diberikan ini dapat dilihat dari tingkat pendidikannya. Pengetahuan dan tingkat pendidikan akan mempengaruhi persepsi seseorang. Seperti yang menyatakan tidak setuju adalah masyarakat yang berpendidikan SMA dan SMP. Sedangkan 4 orang yang menjawab tidak setuju adalah berpendidikan S1. Sehingga cara pandang dan berfikir pun berbeda.

Bagi masyarakat yang memiliki pendidikan lebih tinggi tentunya akan lebih paham dalam hal menganalisis serta mampu untuk mengawasi pemerintahan yang sedang berjalan. Hal itu dilakukan agar masyarakat dapat mendapatkan pelayanan yang seharusnya, serta tidak adanya kecurangan yang terjadi dari pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab.

Pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan secara transparan akan dapat mencegah terjadinya penggelapan dana atau kecurangan dari birokrasi setempat, sehingga masyarakat dapat mengetahui aliran dana tersebut digunakan untuk apa saja. Akan tetapi, pemerintah Kabupaten Bantul belum menerapkan hal ini seperti yang telah diterapkan di Kota Surabaya yang kemudian diikuti DKI Jakarta dan Kota Bandung.

Tabel 3.27

Penilaian Responden terhadap kemampuan Bupati Bantul tahun 2010-2015 untuk melaksanakan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah

No	Jawaban	Frekuensi	Presentase
1	Sangat Setuju	4	4%
2	Setuju	87	87%
3	Tidak Setuju	9	9%
4	Sangat Tidak Setuju	-	-
	Jumlah	100	100%

Sumber: Hasil Kuesioner 19

Berdasarkan tabel 3.27 dapat diketahui bahwa responden yang berpendapat bahwa Bupati Bantul mampu melaksanakan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah adalah 4 responden dengan presentase 4% menjawab sangat setuju, kemudian 87 responden

dengan presentase 87% menjawab setuju, sedangkan 9 responden dengan presentase 9% menjawab tidak setuju.

Nilai indeks terkait kemampuan Bupati dalam melaksanakan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah adalah 2,95 dengan kategori baik. Data dari kuesioner di atas di dukung oleh hasil dari wawancara dengan beberapa masyarakat. Dari 3 orang yang diwawancarai menyatakan setuju jika bupati mampu untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan. Hasil wawancaranya sebagai berikut:

Ibu Maya (29 tahun, Guru) beliau berpendapat bahwa:

“Menurut saya Bupati mampu untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan daerah. Lagian kan juga ada yang mengawasi, ada pengecekan juga, jadi kalau ada apa-apa pasti bisa ketahuan. Tapi sejauh ini aman-aman saja tidak pernah denger adanya laporan keuangan yang bermasalah”.

Bapak Ramadi (40 tahun, pedagang) beliau mengatakan bahwa:

“Saya kira mampu untuk mempertanggungjawabkan keuangannya. Kalau laporan keuangannya tidak diterima oleh DPRD pasti sudah ada ribut-ribut tetapi masih adem ayem ya berarti tandanya baik-baik saja, tidak ada yang bermasalah”.

Bapak Rian (30 tahun, petani) mengatakan:

“Itu saya kurang paham mbak, karena tidak ada akses untuk melihat bisa mempertanggungjawabkan apa tidaknya. Tetapi, selama 5 tahun menjabat tidak pernah ada kasus tentang penggelapan dana atau yang lainnya”.

Peneliti hanya dapat mengumpulkan 3 orang untuk wawancara terkait tanggungjawab Bupati dalam pengelolaan keuangan. Mereka yang menolak menjawab karena, pertama takut salah menjawab, kedua mereka hanya bisa

menentukan jika tidak mampu mempertanggungjawabkan tetapi tidak tahu alasan pastinya dan yang terakhir adalah masyarakat tidak tahu jika harus melihat tanggungjawab pengelolaan keuangan melalui apa saja.

Sedangkan yang menjawab mampu untuk bertanggungjawab karena selama ini ketika Bupati memberikan laporan keuangan ke DPRD tidak pernah ada penolakan karena terjadi pelanggaran. Itu tandanya laporan yang diberikan Bupati baik-baik saja dan tidak ada yang perlu di khawatirkan.

Sebagai seorang Kepala Daerah terkait pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tercantum dalam UU No.32 Tahun 2004 pada pasal 184 yang selanjutnya diganti dengan Undang-Undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pada pasal 320 yang menyebutkan:

- 1) Kepala Daerah menyampaikan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- 2) Laporan keuangan dimaksud paling sedikit meliputi:
  - a) Laporan realisasi anggaran;
  - b) Laporan perubahan saldo anggaran lebih;
  - c) Neraca;
  - d) Laporan operasional;
  - e) Laporan arus kas;



- f) Laporan perubahan ekuitas, dan
  - g) Catatan atas laporan keuangan yang dilampiri dengan ikhtisar laporan keuangan BUMD.
- 3) Penyajian laporan keuangan dilakukan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan
  - 4) Rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dibahas Kepala Daerah bersama DPRD untuk mendapat persetujuan bersama
  - 5) Persetujuan bersama rancangan dilakukan paling lambat 7 (tujuh) bulan setelah tahun anggaran berakhir
  - 6) Atas dasar persetujuan bersama, Kepala Daerah menyiapkan rancangan Perkada tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD

Berikut pernyataan dari BPK terkait dengan laporan keuangan pemerintah kabupaten Bantul tahun 2012-2015:

Tabel 3.28

Pernyataan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun 2012 – 2015

<b>Tahun</b>	<b>Pernyataan BPK</b>	<b>Keterangan</b>
2012	Wajar Dengan Pengecualian (WDP)	Perhatian khusus penggunaan langsung dana Jamkesmas, Penatausahaan dana bergulir, pemberdayaan ekonomi keluarga miskin (PEKM) dan adanya selisih nilai aset tetap hasil inventarisasi yang tidak dapat dijelaskan
2013	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)	Paragraf penjelas berupa penyajian Investasi NonPermanen (dan bergulir) dan penyajian belanja bantuan keuangan alokasi dana desa
2014	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)	Paragraf penjelas masih adanya Dana Alokasi Desa (ADD), Piutang PBB dan aset tetap belum seluruhnya disajikan dengan informasi yang lengkap dan jelas
2015	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)	Paragraf penjelas berupa dana hibah KONI untuk PERSIBA, Dana Alokasi Desa (ADD), aset tetap, serta proses pengadaan tanah pengganti tanah kas desa yang belum selesai dilaksanakan

Sumber: Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Bantul (2015)

Laporan keuangan dari seorang Kepala Daerah sebelum diberikan kepada DPRD terlebih dahulu diperiksa oleh BPK. Untuk laporan keuangan Bupati Bantul yang telah diperiksa oleh BPK tidak ada masalah yang serius selain perubahan dan perbaikan narasi serta paragraf penjelas. Sehingga setiap laporan yang diberikan kepada BPK mendapatkan penilaian Wajar Tanpa Pengecualian pada tahun 2013-2015 dan Wajar dengan Pengecualian pada tahun 2012.

Tabel 3.29

Penilaian Responden terhadap peningkatan transparansi birokrasi pada masa Bupati Bantul tahun 2010-2015

No	Jawaban	Frekuensi	Presentase
1	Sangat Setuju	2	2%
2	Setuju	46	46%
3	Tidak Setuju	50	50%
4	Sangat Tidak Setuju	2	2%
	Jumlah	100	100%

Sumber: Hasil Kuesioner 20

Berdasarkan tabel 3.29 penilaian responden terhadap peningkatan transparansi birokrasi pada masa Bupati Bantul tahun 2010-2015 adalah 2 responden dengan presentase 2% menjawab sangat setuju, kemudian 46 responden dengan presentase 46% menjawab setuju, 50 responden dengan presentase 50% menjawab tidak setuju, dan 2 responden dengan presentase 2% menjawab sangat tidak setuju.

Hasil dari jawaban responden tersebut 48 orang merespon positif sedangkan 52 orang merespon negatif. Nilai indeks terkait peningkatan transparansi birokrasi adalah 2,48 dengan kategori kurang baik. Dalam sebuah pemerintahan transparansi birokrasi harus diutamakan, sehingga setiap aspek kebijakan pemerintah mampu dijangkau oleh masyarakat. Selain itu transparansi birokrasi penting diterapkan agar terjadi pemantauan juga yang dilakukan oleh publik seputar apa yang terjadi di dalam pemerintahan. Sehingga jika terjadi kesalahan dapat segera diperbaiki.

Hal ini sangat penting dilakukan mengingat apa yang terjadi atau apa yang dibuat oleh pemerintah daerah akan berdampak langsung terhadap

masyarakat luas. Itulah mengapa sebuah kebijakan yang diambil harus selalu berdasarkan persetujuan publik. Tidak hanya itu saja transparansi juga merupakan bentuk dari pertanggungjawaban pemerintah kepada rakyat.

Diterapkannya sebuah transparansi birokrasi itu menandakan jika pemerintahan yang baik benar-benar dijalankan. Asumsinya adalah ketika apa yang dijalankan dipemerintahan itu baik dan benar kemudian untuk apa tidak dibuka ke publik, karena pengelolaan pemerintahan yang baik dan bersih itu mengandung makna *good governance*. *Good Governance* merupakan pengelolaan kekuasaan didasarkan pada aturan dan hukum yang berlaku, pengambilan keputusan secara transparan dan bertanggungjawab kepada masyarakat.

Pada dasarnya perubahan zaman dengan kemajuan teknologi harus menuntut seorang Kepala Daerah untuk lebih transparan dalam, menentukan dan memutuskan kebijakan yang ditujukan bagi kepentingan masyarakat. Sehingga kebijakan pemerintah yang sekiranya memberatkan harus diinformasikan kepada publik terlebih dahulu sebelum ditetapkan.

Selain itu setelah melakukan wawancara dengan 7 orang, 2 orang menjawab setuju jika transparan sedangkan 5 orang tidak setuju jika transparan, hasilnya sebagai berikut:

Bapak Sunarto, (52 tahun, buruh tani) mengatakan:

“transparansi birokrasi pada masa itu menurut saya transparan, seperti masyarakat dapat menyampaikan keluhannya ke Bupati. Ya itu tidak dapat bertemu langsung, tetapi ada akses untuk menyampaikannya. Tetapi untuk lebih tepatnya bagaimana, saya kurang tau, tetapi pasti

ada dan menurut saya itu transparan, karena berusaha untuk mendengarkan apa yang diinginkan oleh masyarakat”.

Ibu Ratna, (42 tahun, PNS) beliau mengatakan:

“transparansi birokrasinya itu menurut saya transparan, contohnya dalam hal pengelolaan dan penerimaan tenaga kerja honorer. Sehingga mampu untuk menyerap tenaga kerja yang baru, karena ada akses internet selain itu juga kalau pegawai pasti cepet dapat informasinya”.

Sedangkan hasil wawancara yang menyatakan tidak setuju jika transparan adalah sebagai berikut:

Bapak Ramadi (40 tahun, pedagang) beliau mengatakan bahwa:

“Terkait transparansi birokrasi saya pikir itu tidak transparan. Seperti isu tentang pemotongan “mutasi” pegawai, tetapi tidak diberikan penjelasan kenapa dan untuk apa. Selain itu juga orang-orang yang dekat dengan Bupati yang bisa mendapatkan akses dengan mudah”.

Bapak Tri (57 tahun, PNS) beliau berpendapat bahwa:

“Tidak transparan sama sekali. Setiap pemindahan pegawai tidak ada kejelasan. Seharusnya kan kalau ada pemindahan pegawai ada alasannya. Itu asal dipindah-pindah saja. Selain itu juga PNS ada uang tambahan setiap bulan, tetapi tidak pernah diberikan, entah dikemanakan itu uangnya. Belum lagi masalah kenaikan jabatan, hanya orang yang dekat dengan Bupati dan punya uang yang bisa naik jabatan”.

Ibu Maya (29 tahun, Guru) beliau mengatakan:

“transparansi birokrasi menurut saya kurang mbak, itu terkait dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) berapa dan APBD yang didapat itu berapa dan digunakan untuk apa saja itu masyarakat tidak tau”.

Ibu Rosida (42 tahun, petani) beliau mengatakan:

“menurut saya tidak transparan mbak, seperti halnya pembagian raskin dan kartu jaminan kesehatan itu didasarkan atau kriterianya seperti apa yang bisa dapat. Kalau dibilang berdasarkan perekonomian yang kurang mampu tetapi kenapa yang kurang mampu malah ada yang tidak dapat juga padahal membutuhkan. Jadi dalam hal pendataannya itu sama sekali tidak jelas”.

Bapak Rian (30 tahun, petani) beliau mengatakan:

“Menurut saya tidak transparan, karena akses yang diberikan ke masyarakat itu tidak ada. Seperti kalau mau menyampaikan keluhan kemudian kritik dan saran, kami sebagai masyarakat tidak diberikan akses harus bagaimana dan menghubungi siapa, itu tidak ada”.

Jika melihat hasil dari wawancara di atas, masyarakat memiliki persepsi yang berbeda-beda. Hal itu disebabkan karena persepsi itu tumbuh berdasarkan faktor pribadi (pengalaman dan pengetahuan), keluarga dan lingkungan, baik itu dialami sendiri maupun berdasarkan melihat dan mendengarnya langsung. Jadi tidak salah ketika ditanya satu pertanyaan yang sama mereka memiliki jawaban yang berbeda.

Hal yang dapat diambil berdasarkan hasil dari wawancara adalah, Bupati kurang mampu untuk memberikan aksesnya kepada masyarakat. Sehingga mereka tidak dapat menyampaikan apa yang menjadi kritik, saran hingga keluhan yang ingin disampaikan untuk Bupati. Sebenarnya hal-hal yang disampaikan oleh masyarakat jika ditampung kemudian ditindaklanjuti, hal itu tentunya akan mampu membawa perubahan dan perkembangan ke kehidupan yang lebih baik. Walaupun ada juga yang bisa dikatakan sangat mendukung Ibu Sri Surya Widati ketika beliau menjabat,

hal ini dibuktikan dengan jawaban yang mengatakan transparan namun tidak tahu akses yang digunakan itu apa dan bagaimana.

Pada hakikatnya pemerintahan yang transparan adalah pemerintah yang mampu membuka akses kepada masyarakat kemudian apa saja yang akan atau telah dilakukan, selama hal itu berhubungan dengan masyarakat seharusnya di buka ke publik. Bagaimanapun publik atau masyarakat berhak untuk tahu apa saja yang dikerjakan oleh pemerintahnya. Jika demikian maka akan mencegah kebingungan dari masyarakat, dan mereka tidak akan berfikir negatif terhadap apa-apa saja yang telah dilakukan oleh Bupati tersebut.

Setelah analisis di atas, selanjutnya akan dibuat kesimpulan mengenai persepsi masyarakat terhadap kinerja Bupati Bantul tahun 2010-2015. Data ini berdasarkan hasil dari kuesioner yang telah dijelaskan sebelumnya. Keseluruhan indeks tersebut dibuat dalam bentuk tabel. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 3.30 di bawah ini:

Tabel 3.30

## Skala Indeks

Persepsi Masyarakat Terhadap Kinerja Pemerintah Kabupaten Bantul Pada Masa Kepemimpinan Sri Surya Widati Tahun 2010 - 2015

No	Pertanyaan	Indeks	Kriteria
<b>Produktifitas</b>			
1	Efektifitas birokrasi pemerintah Kabupaten Bantul pada masa Sri Surya Widati tahun 2010-2015 meningkat	2,71	Baik
2	Efisiensi birokrasi pemerintah Kabupaten Bantul pada masa Sri Surya Widati tahun 2010-2015 meningkat	2,77	Baik
3	Bupati Bantul tahun 2010-2015 memiliki dedikasi (pengorbanan tenaga, pikiran, dan waktu) yang baik	2,74	Baik
<b>Rata-rata</b>		<b>2,74</b>	<b>Baik</b>
<b>Kualitas Layanan</b>			
4	Kualitas pelayanan di kantor pemerintah daerah pada masa Bupati Bantul tahun 2010-2015 meningkat	2,87	Baik
5	Sarana dan prasarana pelayanan kesehatan pemerintah Kabupaten Bantul pada masa Sri Surya Widati tahun 2010-2015 meningkat	2,96	Baik
6	Kualitas pelayanan kesehatan pemerintah Kabupaten Bantul pada masa Sri Surya Widati tahun 2010-2015 meningkat	3,05	Baik
<b>Rata-rata</b>		<b>2,96</b>	<b>Baik</b>
<b>Responsivitas</b>			
7	Jumlah penduduk yang memiliki jaminan kesehatan pada masa pemerintahan Sri Surya Widati tahun 2010-2015 meningkat	2,37	Kurang Baik
8	Kualitas pendidikan pada masa pemerintahan Sri Surya Widati tahun 2010-2015 meningkat	2,95	Baik
9	Pertumbuhan ekonomi daerah pada masa pemerintahan Sri Surya Widati tahun 2010-2015 meningkat	2,79	Baik
10	Melalui pengembangan pariwisata kesejahteraan masyarakat pada masa pemerintahan Sri Surya Widati tahun 2010-2015 meningkat	2,54	Baik
11	Ketahanan pangan di daerah pada masa	2,88	Baik



	pemerintahan Sri Surya Widati tahun 2010-2015 meningkat		
<b>12</b>	Kuantitas sarana dan prasarana pendukung ekonomi meningkat pada masa pemerintahan Sri Surya Widati tahun 2010-2015	2,82	Baik
<b>13</b>	Kualitas sarana dan prasarana pendukung ekonomi pada masa pemerintahan Sri Surya Widati tahun 2010-2015 meningkat	2,76	Baik
<b>14</b>	Tingkat pengangguran pada masa pemerintahan Sri Surya Widati tahun 2010-2015 menurun	2,20	Kurang Baik
<b>15</b>	Kesejahteraan masyarakat pada masa pemerintahan Sri Surya Widati tahun 2010-2015 meningkat	2,74	Baik
<b>16</b>	Jumlah sarana dan prasarana publik pada masa pemerintahan Sri Surya Widati tahun 2010-2015 meningkat	2,87	Baik
<b>Rata-rata</b>		<b>2,69</b>	<b>Baik</b>
<b>Akuntabilitas</b>			
<b>17</b>	Bupati Bantul tahun 2010-2015 memiliki kemampuan untuk mengelola keuangan daerah	2,73	Baik
<b>18</b>	Pengelolaan keuangan daerah pada masa pemerintahan Sri Surya Widati tahun 2010-2015 dikelola secara transparan	2,42	Kurang Baik
<b>19</b>	Bupati Bantul tahun 2010-2015 mampu untuk melaksanakan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah	2,95	Baik
<b>20</b>	Transparansi birokrasi pada masa pemerintahan Sri Surya Widati tahun 2010-2015 meningkat	2,48	Kurang Baik
<b>Rata-rata</b>		<b>2,64</b>	<b>Baik</b>
<b>Jumlah Total Indeks</b>		<b>54,60</b>	
<b>Total Rata-rata Indeks</b>		<b>2,73</b>	<b>Baik</b>

$$\begin{aligned}
\text{Nilai Indeks Total rata – rata} &: \frac{\text{Nilai tertinggi} - \text{Nilai terendah}}{\text{Banyaknya Kriteria}} \\
&: \frac{54,60}{20} \\
&: 2,73 \\
&: 2,73 \text{ dengan kriteria Baik}
\end{aligned}$$

Hasil penelitian terkait kinerja Pemerintah Kabupaten Bantul pada Masa Kepemimpinan Sri Surya Widati tahun 2010-2015 jika dilihat dari aspek produktifitas, kualitas layanan, responsivitas, dan akuntabilitas yang sesuai dengan misi Bupati Bantul, capaian Pemerintah Daerah yang digunakan oleh Bupati saat mencalonkan dalam pemilu, dan juga berdasarkan indikator kinerja yang ada dalam LKJ 2015 secara keseluruhan mendapatkan nilai rata-rata indeks 2,73 dengan kriteria baik. Capaian yang diungkapkan oleh level elit, dan juga indikator kinerja dilihat dari LKJ sudah sesuai dengan yang dirasakan oleh masyarakat Kretek, hal ini dibuktikan dengan tidak adanya nilai rata-rata dengan kriteria kurang baik terhadap capaian Pemerintah Kabupaten Bantul tersebut.

Sementara itu, hasil dari kinerja berkaitan dengan aspek produktifitas nilai rata-rata indeksnya adalah 2,74 dengan kategori baik. Hal ini karena efektifitas dan efisiensi birokrasinya yang sudah baik dan membuat masyarakat puas, selain itu juga masyarakat mengatakan bahwa Bupati memiliki dedikasi yang baik.

Aspek kualitas layanan rata-rata indeks yang diperoleh 2,96 dengan kriteria baik, karena adanya peningkatan dalam kualitas pelayanan oleh kantor pemerintah, selain itu juga adanya peningkatan pada sarana prasarana kesehatan dan kualitas pelayanan kesehatan. Persepsi yang diberikan oleh masyarakat dan

hasil yang ada dalam Laporan Kinerja Pemerintah telah sesuai, sehingga peningkatan kesehatan dan kualitas pelayanan yang meningkat bukan hanya berdasarkan pandangan level elit.

Aspek responsivitas rata-rata indeks yang diperoleh 2,69 dengan kriteria baik, karena adanya peningkatan kualitas pendidikan, kualitas sarana dan prasarana ekonomi, masyarakat semakin sejahtera, kemudian peningkatan dalam hal ketahanan pangan dan pertumbuhan ekonomi. Sektor pariwisata juga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tidak hanya itu saja sarana dan prasarana publik untuk penanggulangan bencana mengalami peningkatan. Sementara itu, yang belum mampu ditangani adalah pengangguran karena tidak mengalami penurunan, hal ini disebabkan ketidakmampuan Bupati untuk membuka lapangan pekerjaan, selain itu juga terkait jumlah penduduk yang memiliki jaminan kesehatan belum merata dan tidak tepat sasaran. Aspek responsivitas ini berguna untuk melihat respon dari pemerintah daerah terkait kebutuhan masyarakat, jika kebutuhan masyarakat direspon oleh pemerintah akan terjadi peningkatan dalam sektor tersebut, seperti pertumbuhan ekonomi meningkat, tingkat pendidikan meningkat, kualitas dan sarana prasarana ekonomi mengalami perbaikan, sarana publik dalam penanggulangan bencana juga meningkat, masyarakat sejahtera ditandai dengan menurunnya angka kemiskinan, hal ini terjadi karena pemerintah daerah mampu dan cepat tanggap terhadap aspirasi dan kebutuhan masyarakat.

Aspek akuntabilitas rata-rata indeks yang diperoleh adalah 2,73 dengan kategori baik. Dalam hal akuntabilitas Bupati mampu untuk mengelola keuangan

daerah dan mampu untuk melaksanakan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah. Akan tetapi, dalam hal transparansi pengelolaan keuangan belum dilakukan, karena masyarakat masih belum tahu terkait APBD, PAD dan penerimaan daerah lainnya yang diperoleh untuk menjalankan program apa saja. Hal ini terjadi karena Pemerintah Kabupaten Bantul belum menerapkan *e-budgeting*. Sementara itu, terkait transparansi birokrasi juga perlu diperbaiki, karena masih banyak yang tidak diketahui oleh masyarakat seputar apa yang terjadi di pemerintahan.

Dalam penelitian ini, perbedaan persepsi dari setiap masyarakat disebabkan karena sebuah persepsi terbentuk dari faktor internal dan eksternal. Faktor internal itu terbentuk berdasarkan pengalaman, pengetahuan, tingkat pendidikan, dan pekerjaan. Akan tetapi, faktor yang paling banyak mempengaruhi adalah pengalaman dan pengetahuan. Sedangkan untuk faktor eksternal itu dipengaruhi oleh lingkungan tempat tinggal, serta berasal dari orang-orang terdekat atau dapat juga disebut *social relationship*. Contohnya masyarakat dapat mengatakan bahwa adanya peningkatan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan namun tidak pernah melihatnya sendiri, persepsi tersebut terbentuk karena mendengar dari orang terdekat. Hal ini kemudian mempengaruhi seorang individu dalam memberikan persepsi terkait kinerja dari Pemerintah Kabupaten Bantul.

Selain itu, dalam memberikan persepsi juga mempertimbangkan segi positif dan negatif. Maksudnya adalah ketika seorang individu mendapatkan dampak yang positif dari kinerja Bupati maka akan cenderung memberikan persepsi yang

baik pula. Begitu juga sebaliknya jika mendapatkan dampak yang negatif atau tidak begitu menguntungkan maka akan memberikan persepsi yang negatif. Hal ini disebut juga dengan *Impression Formation*. Seperti saat penulis melakukan wawancara ada beberapa masyarakat yang cenderung mencibir dan mengatakan kinerja dari Bupati itu sangat buruk dalam hal transparansi birokrasi. Tidak hanya berdasarkan kata-katanya saja namun juga diekspresikan melalui mimik wajah, hal ini diperoleh melalui pengamatan saat penelitian. Hasil dari pengamatan yang lain adalah melihat keadaan infrastruktur jalan, jembatan, pasar, selain itu juga melihat langsung Puskesmas dan cara pelayanannya.